



## Kata Pengantar


Dengan memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Sidenreng Raappang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yaitu masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2019 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pangkajene Sidenreng, 31 Maret 2019

BUPATI SIDENRENG RAPPANG 

H. DOLLAH MANDO



## Ikhtisar Eksekutif

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) pada pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan hal yang harus dilakukan di era reformasi. Reformasi Birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan berbangsa, bernegara dan bertanah air. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan berorientasi kepada hasil (*Result Oriented Government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mewujudkan Visi lima tahun kedepan telah ditetapkan 5 Misi, 7 Tujuan, 14 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama. Adapun pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator sasaran untuk tahun pertama (tahun 2019) periode perencanaan 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1 Penigkatan Kualitas Hidup Masyarakat	1 Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan bidang Pendidikan	1 Indeks Pendidikan	62.69	62.02	98.93
	2 Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat	2 Indeks Kesehatan	75.41	69.59	92.28%
2 Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	3 Meningkatnya Produktifitas Sektor-Sektor Perekonomian Daerah	3 Pertumbuhan PDRB	5.27	4.65	105.4 %
	4 Menurunnya Tingkat Kemiskinan	4 Angka Kemiskinan	4.94	4.79	96.96 %
	5 Menurunnya Ketimpangan Distribusi Pendapatan	5 Gini Ratio	0.306	0.284	107.7
3 Peningkatan Kesempatan Kerja	6 Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	6 Nilai Investasi (Juta Rupiah)	157.002	3.035.741	193 %
4 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi yang berwawasan Lingkungan	7 Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi yang Berkualitas	7 Persentase Panjang Jalan	52	53.42	102.7%



Tujuan		Sasaran		Indikator		Target	Realisasi	Capaian		
				8	Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	76.9	76.9	100%		
				9	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	55	77.71	141.2%		
				8	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73.33	-	-
5	Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	9	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	11	Nilai Sakip	51.77	55.33	100%		
				12	Opini laporan Keuangan	WTP	WTP	100%		
		10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	13	Indeks Kepuasan Masyarakat	76.30	70.00	93.20		
				11	Meningkatnya Keberdayaan perempuan dan anak dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan	14	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92.87	93.09	100.2%
						15	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	50.33	31.37	62.32%
6	Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	12	Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri	16	Indeks Ketahanan Sosial	0.7465	0.7465	100 %		
				17	Indeks Ketahanan Ekonomi	0.5576	0.5576	100 %		
				18	Indeks Ketahanan Lingkungan	0.6390	0.6390	100 %		
7	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban serta Kualitas Kehidupan Beragama dan Sosial Budaya	13	Meningkatnya Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat	19	Persentase Angka Kriminalitas per 10.000	15.08	12.14	124.21 %		
				14	Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Budaya Lokal	20	Persentase Benda Situs dan kawasan Cagar budaya yang dilestarikan	50 %	50 %	100 %



## DAFTAR ISI

### KATA

PENGANTAR.....i

IKHTISAR EKSEKUTIF .....ii

DAFTAR ISI .....iv

### DAFTAR

TABEL .....v

### BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang .....1

1.2. Gambaran Umum Kabupaten .....2

1.3. Pertumbuhan Ekonomi .....9

1.4. Kondisi Pemerintahan .....10

1.5. Jumlah Aparatur Sipil Negara .....13

### BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2019– 2023.....15

2.1.1. Visi .....15

2.1.2. Misi .....17

2.1.3. Tujuan dan Sasaran .....17

2.1.4. Strategi dan Arah Kebijakan .....19

2.1.4.1. Strategi Pembangunan Daerah .....19

2.1.4.2. Arah Kebijakan.....20

2.1.4.3. Prioritas Pembangunan Daerah .....20

2.1.4.4. Program Pembangunan Daerah .....21

2.2. Indikator Kinerja Utama ( IKU ) .....21

2.3. Perjanjian Kinerja .....23

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2019 .....26

3.2. Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2019 .....29

3.3. Realisasi Anggaran .....64

3.4. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Tahun 2019 .....70

### BAB IV

PENUTUP .....75

### LAMPIRAN :

1. Pernyataan Telah Direviu Oleh Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
4. Rencana Kinerja Tahunan 2020 Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang
5. SOP Penyusunan LKJIP Kabupaten Sidenreng Rappang
6. Penghargaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019



Tabel 1.1.	Luas Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Kecamatan (Ha) dan Jumlah Desa/Kelurahan
Tabel 1.2.	Keadaan Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018
Tabel 1.3.	Penggunaan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tabel 1.4.	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa) Kabupaten Sidnreng Rappang Tahun 2018-2019
Tabel 1.5.	Urusan Pemerintahan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menjadi Kewenangan Daerah
Tabel 1.6.	Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Jenis Kelamin
Tabel 1.7.	Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 2.1.	Pernyataan Visi, Pokok Visi dan Penjelasan Visi
Tabel 2.2.	Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD
Tabel 2.3.	Indikator Kerja Utama Pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang
Tabel 3.1.	Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran
Tabel 3.2.	Target Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 1
Tabel 3.3.	Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 1
Tabel 3.4.	Perbandingan Target Realisasi Sasaran 1 dengan Target Jangka Menengah
Tabel 3.5.	Efisiensi Pengguna Sumber Daya Sasaran 1
Tabel 3.6.	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2
Tabel 3.7.	Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 2
Tabel 3.8.	Perbandingan Target Realisasi Sasaran 2 dengan Target Jangka Menengah
Tabel 3.9.	Efisiensi Pengguna Sumber Daya Sasaran 2
Tabel 3.10.	Target Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 3
Tabel 3.11.	Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 3
Tabel 3.12.	Perbandingan Target Realisasi Sasaran 3 dengan Target Jangka Menengah



Tabel 3.13.	Efisiensi Pengguna Sumber Daya Sasaran 3
Tabel 3.14.	Target Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 4
Tabel 3.15.	Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 4
Tabel 3.16.	Perbandingan Target Realisasi Sasaran 4 dengan Jangka Menengah
Tabel 3.17.	Efisiensi Pengguna Sumber Daya Sasaran 4
Tabel 3.18.	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5
Tabel 3.19.	Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 5
Tabel 3.20.	Perbandingan Target Realisasi Sasaran 5 dengan Target Jangka Menengah
Tabel 3.21.	Efisiensi Penggunaan Sumber daya Sasaran 5
Tabel 3.22.	Target Capaian Indikator Kinerja sasaran 6
Tabel 3.23.	Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 6
Tabel 3.24.	Perbandingan Target Realisasi Sasaran 6 dengan Target Jangka Menengah
Tabel 3.25.	Efisiensi Pengguna Sumber Daya Sasaran 6
Tabel 3.26.	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran 7
Tabel 3.27.	Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 7
Tabel 3.28.	Perbandingan Target Realisasi Sasaran 7 dengan Target Jangka Menengah
Tabel 3.29.	Efisiensi Pengguna Sumber Daya Sasaran 7
Tabel 3.30.	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran 8
Tabel 3.31.	Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 8
Tabel 3.32.	Perbandingan Target Realisasi Sasaran 8 dengan Target Jangka Menengah
Tabel 3.33.	Efisiensi Pengguna Sumber Daya sasaran 8
Tabel 3.34.	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran 9



Tabel 3.35.	Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 9
Tabel 3.36.	Perbandingan Target Realisasi Sasaran 9 dengan Target Jangka Menengah
Tabel 3.37.	Efisiensi Pengguna Sumber Daya Sasaran 9
Tabel 3.38.	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran 10
Tabel 3.39.	Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 10
Tabel 3.40.	Perbandingan Target Realisasi Sasaran 10 dengan Target Jangka Menengah
Tabel 3.41.	Efisiensi Pengguna Sumber Daya Sasaran 10
Tabel 3.42.	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran 11
Tabel 3.43.	Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 11
Tabel 3.44.	Perbandingan Target Realisasi Sasaran 11 dengan Target Jangka Menengah
Tabel 3.45.	Efisiensi Pengguna Sumber Daya Sasaran 11
Tabel 3.46.	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran 12
Tabel 3.47.	Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 12
Tabel 3.48.	Perbandingan Target Realisasi Sasaran 12 dengan Target Jangka Menengah
Tabel 3.49.	Efisiensi Pengguna Sumber Daya Sasaran 12
Tabel 3.50.	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran 13
Tabel 3.51.	Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 13
Tabel 3.52.	Perbandingan Target Realisasi Sasaran 13 dengan Target Jangka Menengah
Tabel 3.53.	Efisiensi Pengguna Sumber Daya Sasaran 13
Tabel 3.54.	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran 14
Tabel 3.55.	Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 14
Tabel 3.56.	Perbandingan Target Realisasi Sasaran 14 dengan Target Jangka Menengah





Tabel 3.57.	Efisiensi Pengguna Sumber Daya Sasaran 14
Tabel 3.58.	Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

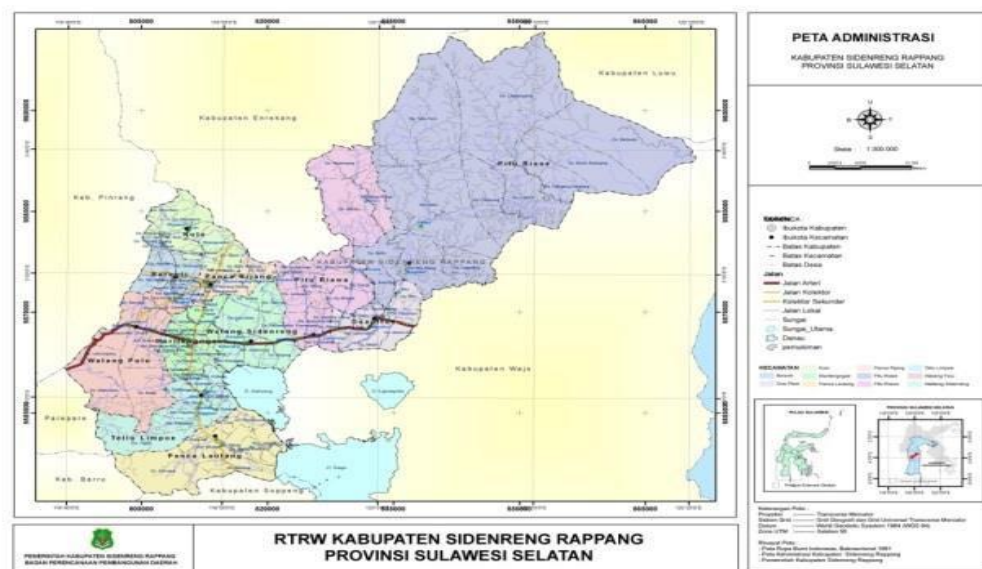
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Instruksi Presiden diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati / Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten / kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

## 1.2 GAMBARAN UMUM

### 1.2.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Sidenreng Rappang secara geografis terletak di diantara  $3^{\circ}43'$ –  $4^{\circ}09'$  Lintang Selatan dan  $119^{\circ}41'$ – $120^{\circ}10'$  Bujur Timur kira-kira 183 Km di sebelah Utara Kota Makassar (Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan). Secara umum kondisi kelerengn wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang didominasi oleh daerah yang datar, kondisi lain adalah daerah perbukitan dan yang lebih kecil adalah daerah pegunungan. Letak Kabupaten Sidenreng Rappang berbatasan dengan :



*Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang*

- Sebelah Utara : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang
- Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo
- Sebelah Selatan : Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng
- Sebelah Barat : Kota Parepare dan Kabupaten Pinrang

Wilayah Administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas 1.883,25 Km<sup>2</sup> terbagi dalam 11 Kecamatan dan 106 Desa/Kelurahan.

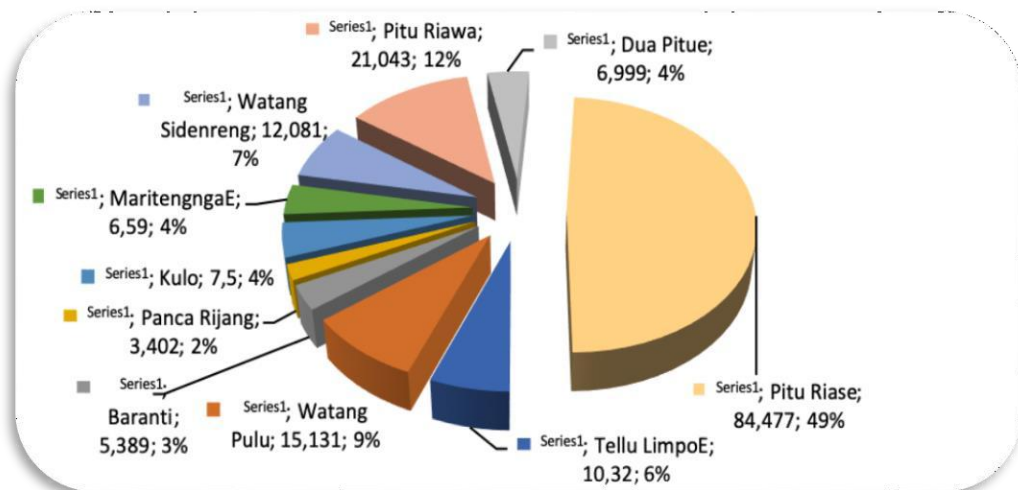


**Tabel 1.1**  
**Luas Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang**  
**Menurut Kecamatan (Ha) dan Jumlah Desa/Kelurahan**

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Desa/Kelurahan	
			Kelurahan	Desa
1	Panca Lautang	15.393	3	7
2	Tellu LimpoE	10.320	6	3
3	Watang Pulu	15.131	5	5
4	Baranti	5.389	5	4
5	Panca Rijang	3.402	4	4
6	Kulo	7.500	-	6
7	MaritengngaE	6.590	7	5
8	Watang Sidenreng	12.081	3	5
9	Pitu Riawa	21.043	2	10
10	Dua Pitue	6.999	2	8
11	Pitu Riase	84.477	1	11
<b>Jumlah</b>		<b>188.325</b>	<b>38</b>	<b>68</b>

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017

Berdasarkan informasi pada Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa dari 11 kecamatan, terlihat bahwa kecamatan terluas adalah Kecamatan Pitu Riase dengan luas 84.477 Ha, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan MaritengngaE dengan luas 6.590 Ha, secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 1.2 Komposisi Pembagian Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang

### 1.2.2. Kondisi Topografi

Kabupaten Sidenreng Rappang dilihat dari kondisi kelerengan dibagi dalam 4 (empat) kategori yaitu :

- Lereng 0-2% meliputi 42,80% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 80.611 Ha, kelerengan ini tersebar di seluruh kecamatan. Jenis penggunaannya adalah sawah, perkebunan rakyat, kolam masyarakat dan perkampungan, Kecamatan yang mempunyai lereng 0–2% paling luas adalah Kecamatan Watang Sidenreng yaitu 11.385 Ha atau 14,12 % dari luas areal yang berlereng 0-2% dan yang tersempit adalah Kecamatan Panca Rijang seluas 3.402 Ha (4,22%) luas areal yang berlereng 0–2%.
- Lereng 2-15 % meliputi 4,6% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 8.790 Ha, kelerengan ini tersebar hanya tersebar pada 5 (lima) Kecamatan, kelerengan ini baik dimanfaatkan untuk tanaman pertanian dengan tetap memperhatikan usaha pengawetan tanah dan air. Jenis penggunaan saat ini adalah sawah, perkebunan rakyat, hutan dan sebagian kecil perkampungan, Kecamatan yang mempunyai lereng 2–15% paling luas adalah Pitu Riase seluas 3.457 Ha (39,33%), Watang Pulu seluas 2.306 Ha atau 26,23%, Panca Lautang seluas 1.389 Ha (15,80), Pitu Riawa seluas 923 Ha (10,55%) dan Tellu LimpoE seluas 715 Ha atau 8,13%. Sedangkan Kecamatan Baranti, Panca Rijang, Kulo, MaritengngaE, Watang Sidenreng dan Dua pituE tidak terdapat jenis kelerengan ini.

Lereng 15-40 % meliputi 16,68% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 31,414 Ha, kelerengan ini tersebar hanya tersebar pada 5 (lima) Kecamatan, kelerengan ini masih



cukup baik dimanfaatkan untuk usaha pertanian dan perkebunan dengan tetap memperhatikan usaha pengawetan tanah dan air. Jenis penggunaan saat ini adalah perkebunan rakyat, hutan dan sebagian kecil perkampungan dan persawahan, Kecamatan yang mempunyai lereng 15-40% paling luas adalah Kecamatan Pitu Riase seluas 20.483 Ha (65,20%), Panca Lautang seluas 3.573 Ha atau 11,37%, Pitu Riase seluas 3.456 Ha (11%), Tellu LimpoE mempunyai luas dengan kelerengan 15-40% 2.244 Ha (7,14%) dan Kecamatan Wattang Pulu seluas 1.658 Ha (5,28%). Sedangkan Kecamatan Baranti, Panca Rijang, Kulo, MaritengngaE, Watang Sidenreng dan Dua PituE tidak terdapat jenis kelerengan ini.

- Lereng di atas 40 % meliputi 34,31% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 64.614 Ha. Daerah ini merupakan daerah yang harus dihindarkan agar dapat berfungsi sebagai pelindung hidrologis serta menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup, kelerengan ini tersebar hanya tersebar pada 5 (lima) kecamatan. Jenis penggunaan saat ini adalah perkebunan, sebagian besar hutan lindung dan tanah yang rusak (kritis), kecamatan yang mempunyai lereng diatas 40% paling luas adalah Kecamatan Pitu Riase seluas 50.811 Ha (78,64%), Pitu Riawa seluas 7.592 Ha (11,75%), Tellu LimpoE mempunyai luas 2.524 Ha (3,91 %), Panca Lautang seluas 2.138 Ha atau 3,31%, dan Kecamatan Watang Pulu seluas 1.549 Ha (2,04 %).

Kondisi topografi untuk wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang bervariasi dengan daratan tertinggi adalah Kecamatan Pitu Riase dengan ketinggian rata-rata 1000 M diatas permukaan laut (dpl), dan dataran terendah adalah Kecamatan Maritengngae, Panca Rijang, Baranti dengan ketinggian rata-rata mulai dari 0-25 M dpl.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan adalah tanah datar, disusul keadaan tanah bergunung, kemudian berbukit dan terakhir adalah Rawa Danau. Khusus Kecamatan Baranti, Maritengngae dan Dua PituE kondisi topografi 100% tanah datar, sedangkan Kecamatan Panca Lautang, Tellu LimpoE, Watang Pulu dan Pitu Riase didominasi keadaan tanah bergunung. Kondisi Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut ini:



**Tabel 1.2**  
**Keadaan Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018**

No	Kecamatan	Keadaan Tanah (%)				
		Datar	Berbukit	Bergunung	Rawa / Danau	Total
1	Panca Lautang	15	25	57	3	100
2	Tellu LimpoE	15	35	49	1	100
3	Watang Pulu	25	5	70	-	100
4	Baranti	100	-	-	-	100
5	Panca Rijang	97	3	-	-	100
6	Kulo	90	5	5	-	100
7	MaritengngaE	100	-	-	-	100
8	Watang Sidenreng	85	15	-	-	100
9	Pitu Riawa	60	10	30	-	100
10	Dua Pitue	100	-	-	-	100

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2018

### 1.2.3. Kondisi Pengguna Lahan

Sumber daya lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat terlihat dari kondisi tutupan lahan atau pemanfaatan lahan yang terbentuk. Pada dasarnya pembentukan pola pemanfaatan lahan dipengaruhi oleh faktor fisik lahan seperti letak geografis, struktur geologi dan tanah, klimatologi wilayah, dan sektor kegiatan ekonomi masyarakat. Pemanfaatan lahan yang terbentuk hingga saat ini di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas Sawah, Pemukiman, Kebun Campur, Ladang, Kolam/Tambak/Rawa, Danau/Sungai, Perkebunan Rakyat, Hutan, Lapangan Olahraga, Semak/Belukar.

Penggunaan lahan didominasi oleh Kawasan Hutan dengan luas 82.669,05 Ha atau mencapai 43,89% dari total luas wilayah Kabupaten sebesar 188.325 Ha, dan Persawahan dengan luas 38.989,58 Ha atau sebesar 20,70% dari luas kabupaten. Khusus untuk kawasan permukiman dengan luas 5.989,95 (3,18%) dengan luas permukiman yang paling besar berada di Kecamatan Maritengngae dengan luas 1.154,57 Ha dan yang paling kecil Kecamatan Baranti dengan luas 282,58 Ha. Secara lengkap struktur penggunaan lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut:



Tabel 1.3  
*Penggunaan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang*

NO	PERUNTUKAN KAWASAN BUDIDAYA	LUAS LAHAN (Ha)
1	Sawah	38.989,58
2	Permukiman	5.989,95
3	Kebun Campur	22.403,32
4	Ladang/Tegalan	2.487,02
5	Kolam/Tambak/Rawa	265,10
6	Danau/Sungai	5.867,86
7	Perkebunan Rakyat	9.323,65
8	Hutan	82.669,05
9	Lapangan Olahraga	5,83
10	Semak/Belukar	20.323,64
	Total	188.325,00

Sumber : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2018

#### 1.2.4 Aspek Demografi

Jumlah penduduk merupakan salah satu potensi oleh suatu daerah dalam menyediakan tenaga kerja dengan kriteria keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses pembangunan. Potensi demografi ini harus dapat diimbangi dengan kualitas kehidupan yang baik agar jumlah penduduk yang besar tersebut tidak menjadi beban tetapi membantu mengatasi berbagai permasalahan sosial ekonomi disuatu daerah termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut:





**Tabel 1.4**

**Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017**

NO.	KECAMATAN	TAHUN									
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Panca Lautang	16,948	17,071	17,241	17,339	17,442	18,113	17,277	17,242	17,203	17,151
2	Tellu Limpoe	21,356	21,511	22,728	22,871	23,089	23,415	23,456	23,582	23,700	23,812
3	Watang Pulu	25,772	25,959	30,128	30,582	30,947	31,590	33,420	34,235	35,061	35,904
4	Baranti	26,378	26,569	28,068	28,369	28,522	28,997	29,476	29,763	30,045	30,313
5	Panca Rijang	25,077	25,258	27,086	27,332	27,613	28,195	28,173	28,383	28,584	28,779
6	Kulo	10,583	10,660	11,345	11,462	11,586	11,831	11,917	12,031	12,147	12,256
7	Maritengngae	40,473	40,767	46,139	46,643	47,203	48,197	48,955	49,563	50,172	50,767
8	Watang Sidenreng	15,616	15,729	17,051	17,203	17,395	17,762	17,605	17,703	17,805	17,893
9	Pitu Riawa	24,038	24,212	24,980	25,213	25,473	26,210	25,831	25,984	26,132	26,269
10	Dua Pitue	26,151	26,340	27,272	27,549	27,865	28,252	28,513	28,775	29,040	29,300
11	Pitu Riase	18,274	18,407	19,873	20,089	20,316	20,745	21,987	22,526	23,096	23,681
<b>Jumlah</b>		250,666	252,483	271,911	274,652	277,451	283,307	286,610	289,787	292,985	296,125



### 1.3. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam proses pembangunan ekonomi, perubahan struktur ekonomi merupakan hal yang penting. Kontribusi masing-masing sektor pembentuk PDRB mungkin saja akan bervariasi dari waktu ke waktu. Untuk melaksanakan pembangunan dengan sumber daya yang terbatas sebagai konsekuensinya harus difokuskan kepada pembangunan sektor- sektor yang memberikan dampak pengganda (*multiplier effect*) yang besar terhadap sektor-sektor lainnya atau perekonomian secara keseluruhan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam melihat pergerakan perekonomian daerah. Oleh karena itu, indikator pertumbuhan ekonomi selalu menjadi acuan awal dalam memetakan kebijakan-kebijakan strategis terkait peningkatan kualitas perekonomian daerah, tak terkecuali Kabupaten Sidenreng Rappang.

Jika melihat perbandingan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki pertumbuhan ekonomi pada kategori rendah dengan capaian 7,11 persen dengan peringkat ke-16 dalam lingkup provinsi. Angka ini berada di bawah angka pertumbuhan ekonomi provinsi yang mencapai 7,23 persen pada tahun 2017 ini. Sebaiknya, potensi yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat meningkatkan posisi pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, permasalahan perekonomian harus diupayakan untuk melihat sektor- sektor strategis dan potensial untuk mendorong roda perekonomian daerah. Pada negara berkembang, kontribusi sektor industri harus memegang peranan yang penting, karena sektor industri sampai saat ini mampu memberikan dampak pengganda terhadap perekonomian. Kegiatan perekonomian daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dominan pada sektor pertanian. Selain aspek perekonomian yang perlu dikembangkan, pembangunan daerah perlu juga memperhatikan aspek sosial dan budaya untuk menyeimbangkan kehidupan yang berbudi dan pekerti yang luhur serta mulia.

Pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan dan merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan, berkelanjutan dan bertahap ketingkat yang lebih maju dan lebih baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pembangunan harus dilakukan secara bertahap di segala bidang/sektor maupun sub sektor secara terencana dan terprogram. Salah satu cara mencapai keberhasilan pembangunan adalah dengan adanya pembangunan ekonomi. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang menjadi pusat perhatian dalam pembangunan nasional, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hasil-hasil strategis terutama yang menyangkut komoditas pangan. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil- hasil produk pertanian ini diharapkan dapat dilakukan secara lebih terencana dengan pemanfaatan yang optimum serta dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.



Indikator pembangunan ekonomi daerah tercermin dalam perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun. Perkembangan PDRB tersebut akan bermanfaat dalam perencanaan pembangunan. Sektor pertanian sendiri merupakan sektor yang memberikan kontribusi cukup besar dalam pembangunan perekonomian. Perkembangan dan Pertumbuhan Atas Sektor PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023.

#### 1.4. Kondisi Pemerintah

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
  1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Dinas Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
  2. Dinas Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata merupakan Dinas Tipe B yang Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
  3. Dinas Kesehatan , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  4. Dinas Sosial merupakan Tipe C Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang social;
  5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Tipe A menyelenggarakan dan desa, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  6. Satua Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Merupakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;



7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu merupakan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
  8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
  9. Dinas perdagangan dan Perindustrian merupakan Tipe B Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
  10. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan persandian;
  11. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup merupakan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pertanahan, urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  12. Dinas Pekerjaan Umum, penata Ruang dan Perhubungan merupakan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  13. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum;
  14. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan merupakan Tipe A yang Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, urusan bidang ketahanan pangan dan urusan pemerintahan bidang perikanan;
  15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
- e. Badan Daerah, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
  2. Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan Badan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan Daerah;
  3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah merupakan Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian pendidikan dan pelatihan;
  4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Tipe A
  5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- f. Kecamatan, terdiri dari :



1. Kecamatan Panca Lautang merupakan Kecamatan Tipe A;
2. Kecamatan Tellu Limpoe merupakan Kecamatan Tipe A;
3. Kecamatan Watang Pulu merupakan Kecamatan Tipe A;
4. Kecamatan Baranti merupakan Kecamatan Tipe A;
5. Kecamatan Panca Rijang merupakan Kecamatan Tipe A;
6. Kecamatan Kulo merupakan Kecamatan Tipe A;
7. Kecamatan Maritengngae merupakan Kecamatan Tipe A;
8. Kecamatan Watang Sidenreng merupakan Kecamatan Tipe A;
9. Kecamatan Pitu Riawa merupakan Kecamatan Tipe A;
10. Kecamatan Dua Pitue merupakan Kecamatan Tipe A;
11. Kecamatan Pitu Riase merupakan Kecamatan Tipe A;

Tabel 1.5 Urusan Pemerintahan  
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014  
Yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO	URUSAN WAJIB (PELAYANAN DASAR)	KETERANGAN
1	Pendidikan	Pendidikan Dasar, PAUD dan Non Formal
2	Kesehatan	-
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;	-
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	-
6	Sosial	-
	<b>URUSAN WAJIB (NON PELAYANAN DASAR)</b>	
1	Tenaga Kerja	-
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
3	Pangan	-
4	Pertanahan	-
5	Lingkungan Hidup	-
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-



9	Perhubungan	-
10	Komunikasi dan Informatika	-
11	Koperasi, usaha kecil, dan menengah	Koperasi dan Usaha Mikro
12	Penanaman Modal	-
13	Kepemudahaan dan Olah Raga	-
14	Statistik	-
15	Persandian	-
16	Kebudayaan	-
17	Perpustakaan	-
18	Kearsipan	-
	<b>URUSAN PILIHAN</b>	
1	Kelautan dan Perikanan	Perikanan
2	Pariwisata	-
3	Pertanian	-
4	Perdagangan	-
5	Kehutanan	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten
6	Energi dan Sumber Daya Meneral	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah Kabupaten
7	Perindustrian	-
8	Transmigrasi	-

## 1.5 Jumlah Aparatur Sipil Negara

### a) Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

**Tabel 1.6**  
**Jumlah PNS menurut jenis kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-Laki	1.978	39,27%
2.	Perempuan	3.058	60,72%
	<b>Total</b>	<b>5.036</b>	<b>100%</b>

Sumber : BKD Kab.Sidrap keadaan Desember 2019



Dari tabel di atas menunjukkan bahwa PNS didominasi oleh perempuan sebanyak 3.056 orang atau 66,26% sedangkan laki-laki sebanyak 1.918 orang atau 33,74% dari total PNS yang ada.

**b) Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

**Tabel 1.7**  
**Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Pendidikan	Jumlah PNS	
		Jumlah	Persentase %
1	S.3	2	0.03%
2	S.2	563	11.18%
3	S.1	3.174	63.03%
4	D.IV	97	1.93%
5	D.III	463	9.19%
6	D.II	48	0.96%
7	D.I	10	0.19%
8	SLTA	635	12.62%
9	SLTP	35	0.70%
10	SD	9	0.17%
	<b>Total</b>	<b>5.036</b>	<b>100%</b>

Sumber : BKD Kab.Sidrap Keadaan Desember 2019





## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1. Rencana Startegis Tahun 2019-2023

Dokumen Perencanaan jangka Menengah Pemerintah Daerah (5 tahun) atau yang disebut dengan Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 - 2023 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

#### 2.1.1. *Visi*

Berdasarkan kondisi Kabupaten Sidenreng Rappang dewasa ini, serta peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang, pasangan H. DOLLAH MANDO (Bupati) – H.MAHMUD YUSUF (Wakil Bupati) membuat Visi Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SEBAGAI DAERAH AGRIBISNIS YANG MAJU DENGAN MASYARAKAT RELIGIUS, AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA”**

Rumusan visi tersebut mencakup lima pokok visi yakni “Sidenreng Rappang Daerah Agribisnis yang Maju”, dengan masyarakat yang Religius, Aman, Adil dan Sejahtera. Kelima pokok visi tersebut, yang menjadi fokus gerakan pembangunan dengan “Sidenreng Rappang” yang dicita-citakan dan diharapkan kedepan, sebagai berikut:



**Tabel 2.1**  
**Pernyataan Visi, Pokok Visi dan Penjelasan Visi**

Visi	Pokok-pokok visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera	<i>Agribisnis yang maju</i>	Pengembangan daerah yang berbasis usaha pertanian terpadu, modern, dan berkelanjutan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang.
	<i>Religius</i>	Masyarakat Sidenreng Rappang adalah insan yang bertaqwa, berperilaku taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki karakter teguh terhadap nilai-nilai agama, bersikap toleran dan menjalin kerukunan hidup dengan pemeluk agama lain, serta kepekaan sosial yang tinggi.
	<i>Aman</i>	Terwujudnya kehidupan sosial masyarakat Sidenreng Rappang yang tenteram dan kondusif yang ditandai dengan menurunnya angka kriminalitas.
	<i>Adil</i>	Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang tanpa diskriminasi yang ditandai dengan adanya pemberian kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sehingga terwujud pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
	<i>Sejahtera</i>	Peningkatan kualitas hidup masyarakat Sidenreng Rappang yang ditandai dengan meningkatnya IPM, pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan dan ketimpangan serta terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat, baik material maupun non material.



### 2.1.2 Misi

Misi berarti serangkaian tujuan terukur dan terstruktur dalam upaya mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut:

1. Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.
2. Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru.
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan.
5. Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance.
6. Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui penerapan desa cerdas, sehat dan mandiri.
7. Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.

### 2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan 7 (tujuh) tujuan, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Tujuan dan Sasaran**

Tujuan		Sasaran		Indikator		Target
1	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan bidang Pendidikan	1	Indeks Pendidikan	62.69
		2	Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat	2	Indeks Kesehatan	75.41
2	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	3	Meningkatnya Produktifitas Sektor-Sektor Perekonomian Daerah	3	Pertumbuhan PDRB	5.27%
		4	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	4	Angka Kemiskinan	4.94%
		5	Menurunnya Ketimpangan Distribusi Pendapatan	5	Gini Ratio	0.306
3	Peningkatan Kesempatan Kerja	6	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	6	Nilai Investasi (Juta Rupiah)	157.002



Tujuan		Sasaran		Indikator		Target
4	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi yang berwawasan Lingkungan	7	Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi yang Berkualitas	7	Persentase Panjang Jalan	52%
				8	Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	76.9%
				9	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	55%
		8	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73.33
5	Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	9	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	11	Nilai Sakip	51.77
				12	Opini laporan Keuangan	WTP
		10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	13	Indeks Kepuasan Masyarakat	76.30
		11	Meningkatnya Keberdayaan perempuan dan anak dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan	14	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92.87
				15	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	50.33
6	Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	12	Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri	16	Indeks Ketahanan Sosial	0.7465
				17	Indeks Ketahanan Ekonomi	0.5576
				18	Indeks Ketahanan Lingkungan	0.6390
7	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban serta Kualitas Kehidupan Beragama dan Sosial Budaya	13	Meningkatnya Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat	19	Persentase Angka Kriminalitas per 10.000	15.08
		14	Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Budaya Lokal	20	Persentase Benda Situs dan kawasan Cagar budaya yang dilestarikan	50 %



## 2.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan

### 2.1.4.1 Strategis

Strategi pembangunan daerah merupakan bagian yang menyajikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memberi penegasan operasional, bahwa strategi merupakan langkah atau upaya berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap setiap tujuan dan sasaran maka rumusan strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas SDM dan pemerataan tenaga pendidik secara bersinergi dengan perbaikan akses layanan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
- b. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, akses layanan kesehatan dan pemerataan tenaga kesehatan yang berkualitas diiringi dengan penerapan pola hidup bersih dan sehat dalam masyarakat.
- c. Meningkatkan daya saing produk pertanian terpadu berbasis petik, olah, kemas dan jual secara beriringan dengan penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha serta pemenuhan sarana dan prasarana pertanian.
- d. Meningkatkan keterpenuhan hak dasar dan keberdayaan penduduk miskin secara bersinergi dengan perbaikan akses dalam lapangan kerja dan lapangan usaha secara merata dan tepat sasaran.
- e. Meningkatkan pendapatan kelompok penduduk bawah dengan pembangunan infrastruktur padat karya, dan beragam skema perlindungan dan bantuan social
- f. Meningkatkan kualitas produk unggulan daerah, membangun jaringan kemitraan, penyederhanaan prosedur perizinan berbasis IT serta meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata.
- g. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan Infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, serta permukiman dan perumahan dengan memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan.
- h. Memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dan bencana.
- i. Meningkatkan disiplin kerja melalui sistem reward dan punishment , kualitas SDM dan profesionalitas aparatur diiringi dengan penataan kelembagaan dan peningkatan sistem pengawasan dalam berjalannya integrasi perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi berbasis elektronik.



- j. Meningkatkan kualitas SDM dan penerapan IT dalam pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan publik yang terintegrasi, penyiapan infrastruktur layanan publik serta pengembangan inovasi daerah.
- k. Menguatkan kelembagaan PUG dan forum anak, menyebarluaskan informasi kesetaraan gender serta urgensi perlindungan perempuan dan anak, peningkatan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas serta meningkatkan keberdayaan perempuan dalam perekonomian.
- l. Meningkatkan sistem pelayanan desa yang inovatif dan responsif berbasis teknologi informasi seiring dengan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparat desa, pemberdayaan Bumdes, pengembangan produk unggulan desa, TTG, pengembangan pola hidup sehat, sistem informasi potensi desa, penggunaan dana desa yang berbasis visi, transparan dan akuntabel.
- m. Meningkatkan ketertiban umum dengan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah.
- n. Meningkatkan partisipasi organisasi dan Lembaga kemasyarakatan dalam pelestarian seni budaya dan pengembangan olahraga.

#### **2.1.4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah**

Berdasarkan rumusan strategi, selanjutnya dirumuskan arah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk lima tahun yang akan datang. Permendagri No. 86 tahun 2017 menegaskan bahwa arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Selengkapnya arah kebijakan yang akan ditempuh Kabupaten Sidenreng Rappang untuk lima tahun yang akan datang.

#### **2.1.4.3 Prioritas Pembangunan Daerah**

Berdasarkan rumusan strategi dan arah kebijakan maka prioritas pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan
2. Penguatan perekonomian daerah
3. Peningkatan investasi dan daya saing pariwisata daerah
4. Penguatan dan pemerataan infrastruktur wilayah
5. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik



6. Pengembangan kawasan pedesaan
7. Peningkatan aktifitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religius, berbudaya dan aman

#### 2.1.4.4 Program Pembangunan Daerah

Selanjutnya, dirumuskan Program Pembangunan Daerah sebagai program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD 2018- 2023 yang akan datang. Perumusan Program Pembangunan Daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

## 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )

Adapun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana berikut :

Tabel 2.3  
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1	Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh Masyarakat	1.	Meningkatnya akses Pelayanan bidang pendidikan	1.	Indeks Pendidikan
		2.	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	2.	Indeks Kesehatan
2.	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	3.	Meningkatnya Produktivitas sector-sektor Perekonomian daerah	3.	Pertumbuhan PDBR
		4.	Menurunnya tingkat kemiskinan	4.	Angka Kemiskinan
		5.	Menurunnya Ketimpangan distribusi pendapatan	5.	Gini Ratio
3.	Meningkatnya peluang investasi dan kesempatan kerja	6.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	6.	Nilai Investasi
4.	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas antar wilayah	7.	Meningkatnya Infrastruktur ekonomi yang berkualitas	7.	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik
				8.	Persentase jembatan dalam kondisi baik
				9.	Persentase Irigasi dalam kondisi baik





		8.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	10.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
5.	Meningkatnya Kualitas Tatakelola penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan public	9.	Meningkatnya kinerja pemerintahan daerah	11.	Nilai SAKIP
				12.	Opini Laporan Keuangan
		10.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	13.	Indeks Kepuasan Masyarakat
		11.	Meningkatnya Keberdayaan perempuan dan anak dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan	14.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
15.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				
6.	Meningkatnya Pembangunan Desa	12.	Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri	16.	Indek Ketahanan Sosial
				17.	Indeks Ketahanan Ekonomi
				18.	Indeks Ketahanan Lingkungan
7.	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan sosial budaya	13.	Meningkatnya Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat	19.	Persentase angka kriminalitas per 10.000
		14.	Meningkatnya Penerapan Nilai-nilai budaya local	20.	Persentase benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang di lestarikan.



## 2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1		
Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2019
Indeks Pendidikan	%	62.69

Sasaran Strategis 2		
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2019
Indeks Kesehatan	%	75.41

Sasaran Strategis 3		
Meningkatnya produktivitas sector-sektor perekonomian		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2019
Pertumbuhan PDRB	%	5.27



Sasaran Strategis 4 Menurunnya Tingkat kemiskinan		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2019
Angka Kemiskinan	%	4.94

Sasaran Strategis 5 Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2019
Gini Ratio	%	0.306

Sasaran Strategis 6 Meningkatnya pertumbuhan Investasi		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2019
Nilai Investasi	Rp (Juta Rupiah)	157.002

Sasaran Strategis 7 Meningkatnya infrastruktur ekonomi yang berkualitas		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2019
Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik	%	52
Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	76.9
Persentase irigasi dalam kondisi baik	%	55

Sasaran Strategis 8 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2019
Indeks kualitas lingkungan hidup	%	73.33

Sasaran Strategis 9 Meningkatnya kinerja pemerintah daerah		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2019
Nilai / Predikat SAKIP	Nilai	51.77 ( CC)
Opini laporan keuangan	Opini	WTP



Sasaran Strategis 10		
Meningkatnya kualitas pelayanan public		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2019
Indeks Kepuasan masyarakat	%	76.30

Sasaran Strategis 11		
Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2019
Indeks Pembangunan Gender	%	92.87
Indeks Pemberdayaan Gender	%	50.33

Sasaran Strategis 12		
Terwujudnya desa maju dan mandiri		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2019
Indeks Ketahanan sosial	%	0.7465
Indeks ketahanan ekonomi	%	0.5576
Indeks ketahanan lingkungan	%	0.6390

Sasaran Strategis 13		
Meningkatnya kenyamanan kehidupan bermasyarakat		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2019
Persentase angka kriminalitas per 10.000	%	15.08

Sasaran Strategis 14		
Meningkatnya penerapan nilai-nilai budaya local		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2019
Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	50



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Sidenreng Rappang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan. Dari Perencanaan yang sudah dibuat kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

#### 3.1 CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing - masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program / kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.



Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75 % sd. 100 %	Baik (B)
3	55 % sd. 75 %	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

Secara umum Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018–2023.

Dalam RPJMD terdapat 7 (tujuh) Misi, 7 (tujuh) Tujuan dan 14 (empat belas) sasaran, dengan 20 (dua puluh) indikator sasaran. Misi I terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 2 indikator kinerja, Misi II terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 3 indikator kinerja, Misi III terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 1 indikator kinerja, Misi IV terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator kinerja, Misi V terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 5 indikator kinerja, Misi VI terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 3 indikator kinerja dan Misi VII terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 2 indikator kinerja.

**Tabel 3.1**  
**Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran**

No.	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase
Misi I ( 2 Indikator Sasaran )			
1	Baik Sekali	0	0
2	Baik	1	75.41
3	Cukup	1	62.69
4	Kurang	0	0
	<b>Jumlah</b>	2	69.05
Misi II ( 3 Indikator Sasaran )			
1	Baik Sekali	0	0
2	Baik	1	70.00
3	Cukup	1	60.00



4	Kurang	1	50.00
	<b>Jumlah</b>	3	60,00
Misi III ( 1 Indikator Sasaran )			
1	Baik Sekali	0	0
2	Baik	1	75.00
3	Cukup	0	0
4	Kurang	0	0
	<b>Jumlah</b>	1	75.00
Misi IV ( 4 Indikator Sasaran )			
1	Baik Sekali	0	0
2	Baik	2	75.11
3	Cukup	0	0
4	Kurang	2	53.50
	<b>Jumlah</b>	4	64.30
Misi V ( 5 Indikator Sasaran )			
1	Baik Sekali	0	0
2	Baik	3	84.54
3	Cukup	0	0
4	Kurang	2	51.05
	<b>Jumlah</b>	5	67.79
Misi VI ( 3 Indikator Sasaran )			
1	Baik Sekali	0	0
2	Baik	0	0
3	Cukup	3	60.00
4	Kurang	0	0
	<b>Jumlah</b>	3	60.00
Misi VII ( 2 Indikator Sasaran )			
1	Baik Sekali	0	0
2	Baik	0	0
3	Cukup	1	60
4	Kurang	1	50
	<b>Jumlah</b>	2	55.00



Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 14 (empat belas) Sasaran Strategis dan 22 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama, diketahui bahwa 7 indikator sasaran atau 76,15 % bermakna Baik , 7 indikator sasaran atau 60,67 % bermakna Cukup, dan 6 indikator sasaran atau 4,55 % bermakna kurang. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 62,65 %, dan dikategorikan cukup. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2019 bermakna cukup

### 3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA PEMERINTAHAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing - masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

#### *Sasaran 1 : Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan*

- a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.2  
Target Capain Indikator Kinerja sasaran 1

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
		Target	Realisasi	
1 Indeks Pendidikan	%	62.69	62.02	98.93
Rata-rata capaian kinerja				98.93

Sumber data : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang

Indikator kinerja pada sasaran meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan menunjukkan realisasi indeks pendidikan 62.02 dari target 62.69 dan mencapai target yaitu sebesar 98.93 % di tahun ini.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capain kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.





Tabel 3.3

Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 1

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1 Indeks Pendidikan	%	60.09	61.83	62.02	95.85	98.62	98.93
Rata-rata capaian kinerja		60.09	61.83	62.02	95.85	98.62	98.93

Sumber data : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja pada sasaran Stretgis 1 Meningkatnya akses pelayanan bidang pendidikan telah mencapai target. Rata –rata capaian kinerja pada tahun 2019 mengalami peningkatan Jika dibandingkan dengantahun lalu, yaitu dari 98.62% meningkat menjadi 98.93% pada tahun 2019 , Capaian kinerja pada tahun ini sebesar 98.93 %, dikategorikan baik sekali.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengantahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.4

Perbandingan Target Realisasi sasaran 1  
dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Indeks Pendidikan	%	62.02	66.43

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sebesar 62.02 % sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 66.43%, perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2019 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RJMD Kabupaten Sidenreng Rappang maka indikator tersebut belum mencapai target jangka menengah.

- d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Tercapainya sasaran peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dapa diukur melalui indikator Indeks Pendidikan. Indikator sasaran telah tercapai disebabkan oleh optimalnya aksesibilitas, sarana dan prasarana dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan dan maksimalnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Serta proaktifnya Lembaga dalam



melakukan pembelajaran terhadap masyarakat, dan pemantauan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terutama bidang PAUD PNF terhadap lembaga terkait penyelenggaraan paket, dan perbaikan data pokok sehingga bisa mendapatkan DAK. Sebagai tindaklanjut alternative untuk tetap mencapai indicator sasaran maka dirumuskanlah beberapa yang berkaitan secara teknis operasional dengan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan,yaitu memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.5  
Efisiensi Pengguna Sumber Daya Sasaran 1

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatkan Akses dan Kualitas layanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	98.93	97.42	1.51

Penyerapan anggaran pada tahun 2019 sebesar 97,42 % dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.132.451.067.000. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 98.93 % maka tingkat efisiensi sebesar 1.51 %

f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan.

1. Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). dalam hal ini Bidang PAUD untuk mencari informasi dan mendistribuksikan kepada pengelola PAUD terutama terkait akreditasi dan maksimalisasi perbaikan Data Pokok PAUD untuk *verifikasi* anggaran DAK fisik maupun non fisik.
2. Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. tidak tercapai disebabkan oleh belum optimalnya aksesibilitas, sarana dan prasarana dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan dan belum maksimalnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan.
3. Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Penurunan pencapaian indikator pada sasaran **Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan** disebabkan oleh banyaknya penambahan guru baru di satuan pendidikan sedangkan rombel tetap.
4. Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan Kesetaraan. Proaktifnya Lembaga dalam melakukan pembelajaran terhadap masyarakat, dan pemantauan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terutama bidang PAUD PNF terhadap lembaga terkait penyelenggaraan paket, dan perbaikan data pokok sehingga bisa mendapatkan DAK.



**Sasaran 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**

- a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.6  
Target Capaian Indikator Kinerja sasaran 2

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
		Target	Realisasi	
1 Indeks Kesehatan	%	75.41	69.59	92.28
Rata-rata capaian kinerja				92.28

Sumber data : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang

Indikator kinerja pada sasaran meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat menunjukkan realisasi indeks Kesehatan 69.59 dari target 75.41 dan mencapai target yaitu sebesar 92.28% di tahun ini.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.7  
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 2

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1 Indeks Kesehatan	%	68.82	69.15	69.59	-	-	92.28
Rata-rata capaian kinerja							

Sumber data : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja pada sasaran Stretgis 2 Meningkatnya akses pelayanan bidang kesehatan telah mencapai target. Realisasi kinerja pada tahun 2017 -2019 terus mengalami peningkatan, Capaian kinerja pada tahun 2017-2018 tidak terukur dikarenakan untuk IKU target Indeks Kesehatan baru ada pada RPJMD 2018-2023. Maka tidak ada perbandingan capaian kinerja dari tahun lalu. Capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 92.28 %, dikategorikan baik.



- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.8  
Perbandingan Target Realisasi sasaran 2  
dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Indeks Kesehatan	%	62.59	76.6

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sebesar 62.059% sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 76.6%, perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2019 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RJMD Kabupaten Sidenreng Rappang maka indikator tersebut belum mencapai target jangka menengah.

d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Tercapainya peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan adanya akses akan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, terjangkau dan berkualitas disertai system pelayanan kesehatan berdasarkan standar pelayanan kesehatan.

Adanya komitmen bersama antar pelaku pembangunan kesehatan baik ditingkat bawah atau tingkat pelaksana, juga antara pihak legislative (DPRD) dan eksekutif (Bupati) yang berwenang menetapkan dan pengambilan keputusan untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kesehatan.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.9  
Efisiensi Pengguna Sumber Daya Sasaran 2

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	92.28	78.95	13.33

Penyerapan anggaran pada tahun 2019 sebesar 78.95% dari total anggaran. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 92.28 % maka tingkat efisiensi sebesar 13.33 %



f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan.

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita;
4. Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak;
5. Program Lingkungan Sehat;
6. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan;

**Sasaran 3 : Meningkatkan Produktivitas Sektor-Sektor Perekonomian**

a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.10  
Target Capaian Indikator Kinerja sasaran 3

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
		Target	Realisasi	
1 Pertumbuhan PDRB	%	5.27	4.65	111.76
Rata-rata capaian kinerja				111.76

Sumber data : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang

Indikator kinerja pada sasaran meningkatkan produktivitas sector-sektor perekonomian menunjukkan realisasi pertumbuhan PDRB 4.65 dari target 5.27 dan mencapai target yaitu sebesar 111.76% di tahun ini.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.11  
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 3

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1 Pertumbuhan PDRB	%	7.09	5.02	4.65	74.33	104	111.76
Rata-rata capaian kinerja							

Sumber data : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja pada sasaran Stretgis 3 Meningkatnya produktifitas sector-sektor perekonomian telah mencapai target. Rata –rata capaian kinerja pada tahun 2019 mengalami peningkatan Jika dibandingkan dengantahun lalu, yaitu dari 104% meningkat menjadi 111.76% pada tahun 2019 , Capaian kinerja pada tahun ini sebesar 111.76%, dikategorikan baik sekali.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.12  
Perbandingan Target Realisasi sasaran 3  
dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Pertumbuhan PDRB	%	4.65	6.39

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sebesar 4.65 % sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 6.39%, perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2019 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RJMD Kabupaten Sidenreng Rappang maka indikator tersebut belum mencapai target jangka menengah.

- d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

- Capaian sasaran pada sektor pertanian :
  - Adanya program pemerintah berupaya khusus melalui percepatan tanam yang anggarannya bersumber dari tugas pembantu serta pengadaan atau pembangunan sarana prasarana pertanian;
  - Pembangunan Embun sebanyak 12 Unit;
  - Pembangunan Irigasi Pompanisasi sebanyak 3 Unit;
  - Pengawasan dan perencanaan pembangunan jalan tani sebanyak 4 paket;
  - Pembangunan Dam dan Long Storage masing-masing unit.
- Capaian sasaran pada sector Peternakan :
  - Pencegahan dan penyakit menular ternak;
  - Peningkatan produk hasil peternakan;
  - Peningkatan Pemasaran hasil peternakan;
  - Peningkatan penerapan pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan.



- Capaian sasaran pada sector perikanan :
  - Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan;
  - Pengembangan budidaya perikanan;
  - Pengembangan Perikanan tangkap;
  - Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar.
  
- Capaian sasaran pada sector UMKM :
  - Guna Mendukung tumbuhnya UMKM pemerintah kabupaten Sidrap memberikan kemudahan dalam perizinan.
  - Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan guna peningkatan pengetahuan dan skill bagi masyarakat produktif untuk membuka lapangan kerja;

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.13

Efisiensi Pengguna Sumber Daya Sasaran 3

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatkan produktivitas sector-sektor perekonomian daerah	Pertumbuhan PDRB	111.76	99.99	11.77

Penyerapan anggaran pada tahun 2019 sebesar 99.99%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 111.76% maka tingkat efisiensi sebesar 11.77 %

f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan.

Program	Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatkan peranan pertanian dalam perekonomian	Kontribusi tanaman pangan terhadap PDRB	%	19,65	20,98	106,77
	Kontribusi Tanaman Hortikultura terhadap PDRB	%	0,70	0,66	94,29
	Kontribusi tanaman Perkebunan terhadap PDRB	%	2,75	2,12	77,09
	Ketersediaan Pangan Utama	Kg	1.532,03	1.041,05	67,95
Meningkatnya Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor peternakan	Kontribusi peternakan terhadap PDRB	%	5,22	5.41	103,64
Meningkatnya Laju pertumbuhan ekonomi sub sector perikanan	Kontribusi perikanan terhadap PDRB	%	0,63	0,64	101,59



#### Sasaran 4 : Menurunnya Tingkat Kemiskinan

- a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.14  
Target Capaian Indikator Kinerja sasaran 4

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
		Target	Realisasi	
1 Indeks Angka Kemiskinan	%	4.94	4.79	103.03
Rata-rata capaian kinerja				103.03

Sumber data : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang

Indikator kinerja pada sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan menunjukkan realisasi indeks Angka Kemiskinan 4.79 dari target 4.94 dan mencapai target yaitu sebesar 103.03% di tahun ini.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.15  
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 4

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1 Indeks Angka Kemiskinan	%	5.32	5.16	4.79	-	-	103.03
Rata-rata capaian kinerja		5.32	5.16	4.79	-	-	103.03

Sumber data : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja pada sasaran Stretgis 4 Menurunnya Tingkat Kemiskinan telah mencapai target. Rata-rata Realisasi kinerja pada tahun 2017 -2019 terus mengalami peningkatan. Sedangkan Rata-rata Capaian kinerja pada tahun 2017-2018 tidak terukur dikarenakan untuk IKU target Indeks Anngka Kmiskinan baru ada pada RPJMD 2018-2023. Maka tidak ada perbandingan capaian kinerja dari tahun lalu. Capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 96.96 %, dikategorikan baik.





- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.16  
Perbandingan Target Realisasi sasaran 4  
dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Angka Kemiskinan	%	4.79	4.13

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sebesar 4.79 % sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 4.13%, perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2019 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut belum mencapai target jangka menengah.

**d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja**

Persentase Angka Kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang cukup signifikan dapat dilihat dari data Persentase Angka Kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 dengan jumlah 5,16 % mengalami Penurunan pada tahun 2019 menjadi 4,79 %. Penurunan jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang sangat dipengaruhi oleh program-program unggulan dari Pemerintah seperti Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan juga Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah mencakup cukup banyak Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Sidenreng Rappang, pada Tahun 2019 jumlah penerima BPNT adalah 11.089 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sedangkan untuk PKH sendiri telah mencakup 7424 KPM di Kabupaten Sidenreng Rappang terbukti berhasil menurunkan jumlah persentase Angka Kemiskinan.

Selain itu dengan adanya Tim Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang yang senantiasa bersinergi dalam usaha Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal itu juga didukung oleh banyaknya kepedulian masyarakat terhadap masyarakat kurang mampu serta peran dari para Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Masyarakat seperti pendamping PKH, TKSK, PSM, Peksos dan *Stakeholder* terkait di Kelurahan dan Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang



e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.17

Efisiensi Pengguna Sumber Daya sasaran 4

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan	103.03	99.99	3.04

Penyerapan anggaran pada tahun 2019 sebesar 99.99% dari total anggaran. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 103.03% maka tingkat efisiensi sebesar 3.04%

f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan trend kecendrungan menurun ini merupakan outcomes dari pelaksanaan program/ kebijakan kegiatan kemiskinan daerah diantaranya :

- Terlaksananya pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS);
- Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas
- Pemberian pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
- Penanganan PMKS
- Tercapainya Perlindungan dan jaminan social bagi keluarga penerima manfaat,
- Meningkatkan peran aktif kelembagaan dan kesejahteraan social dan pengembangan model kelembagaan jaminan sosial
- Meningkatkan keterpenuhan hak dasar dan keberdayaan penduduk miskin secara bersinergi dengan perbaikan akses dalam lapangan kerja dan lapangan usaha secara merata dan tepat sasaran.



**Sasaran 5 : Menurunnya Ketimpangan Distribusi Pendapatan**

- a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.18  
Target Capain Indikator Kinerja sasaran 5

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
		Target	Realisasi	
1 Indeks Gini Ratio	%	0.306	0.284	107.18
Rata-rata capaian kinerja				107.18

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidenreng Rappang

Indikator kinerja pada sasaran Menurunnya Ketimpangan Distribusi Pendapatan menunjukkan realisasi indeks Gini Ratio 0.284 dari target 0.306 dan mencapai target yaitu sebesar 107.18% di tahun ini.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.19  
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 5

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1 Indeks Gini Ratio	%	0.325	0.340	0.284	-	-	107.18
Rata-rata capaian kinerja		0.325	0.340	0.284	-	-	107.18

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidenreng Rappang

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja pada sasaran Stretgis 5 Menurunnya Ketimpangan Distribusi Pendapatan telah mencapai target. Realisasi kinerja pada tahun 2017 -2019 terus mengalami peningkatan, Capaian kinerja pada tahun 2017-2018 tidak terukur dikarenakan untuk IKU target Indeks Gini Ratio baru ada pada RPJMD 2018-2023. Maka tidak ada perbandingan capaian kinerja dari tahun lalu. Capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 107.18 %, dikategorikan sangat baik.



- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.20  
Perbandingan Target Realisasi sasaran 5  
dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Indeks Gini Ratio	%	0.284	0.241

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sebesar 0.284 % sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 0.241%, perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2019 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut belum mencapai target jangka menengah.

**d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja**

Gini Tasio digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan penduduk, angka koefisien gini berkisar antara 0-1, semakin mendekati 0 nilai gini, semakin tidak timpang pendapatan masyarakat dalam suatu wilayah.

Untuk Kabupaten Sidenreng Rappang, nilai Koefisien gini sejak tahun 2017 hingga 2019 semakin kecil, yang berarti ketimpangan pendapatan masyarakat semakin rendah. Bahkan ditahun 2019 rasio gini Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan yang paling rendah se Provinsi Sulawesi Selatan (0.284). salah satu factor yang menyebabkan ketimpangan pendapatan rendah karena rendahnya pula prestasi miskin di Kabupaten Sidenreg Rappang yang mengakibatkan Gap (Jarak) pendapatan antara penduduk miskin dan menengah ke atas semakin kecil.

**e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Tabel 3.21  
Efisiensi Pengguna Sumber Daya sasaran 5

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Menurunnya Ketimpangan Distribusi Pendapatan	Gini Ratio	107.18	97.42	9.76

Penyerapan anggaran pada tahun 2019 sebesar 97,42 % dari total anggaran. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 107.18% maka tingkat efisiensi sebesar 9.76%



#### f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Berdasarkan Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai koefisien gini bernilai 0 – 0.4 tingkat ketimpangan rendah, 0.4 – 0.5 tingkat ketimpangan sedang dan 0.5 – 1 tingkat ketimpangan tinggi, artinya semakin rendah tingkat ketimpangannya, menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. mencapai target dikarenakan :

- Indeks Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan diantara populasi.
- Meningkatkan perekonomian daerah yaitu dengan cara adanya pertumbuhan ekonomi yang merata sehingga pembangunan ekonomi akan tercapai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Partisipasi masyarakat memiliki peran yang penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan perkapita, tercapainya pembangunan ekonomi akan berdampak kepada peningkatan perekonomian. Basis ekonomi diletakkan pada 3 komponen utama yaitu 1) pertanian dalam skala luas yang meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan peternakan dan hortikultura, 2) pariwisata alam dan budaya dengan segala kekhasannya , 3) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan perdagangan tradisional yang menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat;
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas dan kualitas suatu daerah melalui pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan negara yang makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian suatu daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional. Peningkatan kualitas SDM yaitu pendidikan yang berkualitas, berkarakter, bermoral dan berakhlak mulia, serta layanan kesehatan yang terjangkau, merata dan berkualitas;
- Kemandirian masyarakat bersumber dari kemandirian dan kemajuan rakyatnya, oleh sebab itu kemandirian masyarakat adalah gerbang utama menuju kemajuan dan kesejahteraan. Kemandirian daerah akan memacu kemampuan produktif guna memenuhi kebutuhan dasar dan mekanisme untuk tetap dapat bertahan dalam situasi krisis.
- Untuk Kabupaten Sidenreng Rappang nilai koefisien gini pada tahun 2019 semakin kecil, yang berarti ketimpangan pendapatan masyarakat semakin rendah bahkan merupakan yang paling rendah se provinsi Sulawesi Selatan.



**Sasaran 6 : Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Daya Saing Pariwisata Daerah**

- a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.22  
Target Capaian Indikator Kinerja sasaran 6

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
		Target	Realisasi	
1 Nilai Investasi	Rp	157.002.306	3.035.750.260.552	193.56
Rata-rata capaian kinerja				193.56

Sumber data : Dinas PMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang

Indikator kinerja pada sasaran Menurunnya Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Daya Saing Pariwisata Daerah menunjukkan realisasi Nilai Investasi Rp.3.035.750.260.552,- dari target 157.002.306,- dan mencapai target yaitu sebesar 193.56% di tahun ini.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.23  
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 6

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1 Nilai Investasi	Rp	960.215.000.00	156.977.306.000	3.035.750.260.552	-	-	193.56
Rata-rata capaian kinerja							

Sumber data : Dinas PMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja pada sasaran Stretgis 5 Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Daya Saing Pariwisata Daerah telah mencapai target. Realisasi kinerja pada tahun 2017 -2019 mengalami peningkatan, Capaian kinerja pada tahun 2017-2018 tidak terukur dikarenakan untuk target IKU Indikator sasaran Nilai Investasi baru ada pada RPJMD 2018-2023. Maka tidak ada perbandingan capaian kinerja dari tahun lalu. Capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 193.56%, dikategorikan sangat baik.



- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.24  
Perbandingan Target Realisasi sasaran 6  
dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Nilai Investasi	Rp	3.035.750.260.552	157.227.000.000

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sebesar Rp.3.035.750.260.552 sedangkan target untuk jangka menengah sebesar Rp.157.227.000.000, perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2019 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut telah mencapai target jangka menengah.

- d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

No	Jenis Investasi	Jumlah Izin	Realisasi Investasi (Rp)
1.	PMA	2	2.198.963.559,-
2.	PMDN	61	3.033.551.296.993,-
JUMLAH		63	3.035.741.064.251,-

Sumber data : Dinas PMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang

- Pengembangan strategi dan instrument promosi yang mencitrakan dan memperkuat *brand image* Sidenreng Rappang sebagai daerah dengan iklim investasi bidang agribisnis yang kondusif sesuai dengan visi penanaman modal.
- Secara geografis, demografis, dan topografis Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi dan beraneka ragam yang apabila dikelola secara terpadu dan komprehensif, dapat memberikan nilai tambah ekonomi yang sangat tinggi baik bagi kesejahteraan masyarakat maupun bagi penerimaan keuangan daerah.
- Sektor ekonomi yang menjadi basis untuk dikembangkan adalah sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Dengan demikian, maka pengembangan kegiatan penanaman modal perlu diupayakan ke arah pengembangan agribisnis. Untuk itu perlu didukung dengan penyediaan sarana prasarana dan infrastruktur pendukung agar terjamin kelancaran pasokan bahan baku dan akses pasar yang lebih efisien, baik pada skala domestic maupun internasional.



- Ketersediaan lahan dengan tingkat produktivitas yang relative sudah baik, meskipun belum optimal sesuai ketersediaan potensi memerlukan perhatian dari pemerintah daerah untuk meningkatkannya melalui berbagai program lintas sektoral dan terpadu menuju penatausahaan agribisnis yang modern.
- Tingginya nilai tambah ekonomi bagi pengembangan usaha industry pengolahan yang relative masih sangat sedikit ragamnya memerlukan usaha-usaha diversifikasi industry, terutama industry pengolahan yang menggunakan hasil-hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan sebagai bahan baku utama.
- Untuk mendorong kegiatan penanaman modal, diperlukan usaha-usaha promotif, pendampingan dan fasilitas, serta proses perizinan yang lebih ramah, murah, dan terjangkau serta pelayanan yang cepat dari seluruh unsur pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Kepastian hukum sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan penanaman modal, untuk itu diperlukan usaha untuk mensinkronisasi regulasi daerah dengan regulasi nasional.
- Kemudahan dan insentif penanaman modal perlu terus ditingkatkan untuk mendorong peningkatan kegiatan penanaman modal, bukan hanya untuk investasi asing, tapi juga untuk investasi domestic, khususnya bagi UMKMK

**e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Tabel 3.25

Efisiensi Pengguna Sumber Daya sasaran 6

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Pertumbuhan Invesatsi	Nilai Investasi	193.56	100	93.56

Penyerapan anggaran pada tahun 2019 sebesar 100% dari total anggaran yang dialokasikan.

Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 193.56% maka tingkat efisiensi sebesar 93.56%

**f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan**

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
  - a. Peningkatan terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah;
  - b. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
  - c. Peningkatan kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal





2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
  - a. Pengembangan system informasi penanaman modal.

**Sasaran 7 : Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi yang berkualitas**

- a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

**Tabel 3.26**  
**Target Capaian Indikator Kinerja sasaran 7**

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
		Target	Realisasi	
1 Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik Dengan Kecepatan	%	52	53.42	102.7
2 Persentase Jembatan dalam Kondisi baik	%	76.9	75.9	100
3 Persentase Irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	55	77.71	141.29
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>				<b>114.66</b>

Dari 3 Indikator kinerja yang mendukung sasaran 7 Meningkatnya infrastruktur ekonomi yang berkualitas, 2 indikator telah melampaui target. Dan Indikator Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik telah mencapai sesuai target. Rata rata Capaian Kinerja pada sasaran ini sebesar 114.66%.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

**Tabel 3.27**  
**Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 6**

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1 Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik Dengan Kecepatan	%	50.87	51.17	53.42	100	100	102.7
2 Persentase Jembatan dalam Kondisi baik	%	73.71	76.60	76.9	100	100	100
3 Persentase Irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	74.22	76.37	77.71	100	100	141.29
<b>Rata-rata Capaian</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>114.66</b>



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Meningkatnya infrastruktur ekonomi yang berkualitas capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 100 % pada tahun 2018 meningkat menjadi 114.66 % pada tahun 2019.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.28  
Perbandingan Target Realisasi sasaran 7  
dengan Target Jangka Menengah

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik Dengan Kecepatan	%	53.42	61
Persentase Jembatan dalam Kondisi baik	%	76.9	84
Persentase Irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	77.71	75

Perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2019 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, 2 indikator belum mencaapai target jangka menengah dan 1 indikator telah melampaui dari target kinerja jangka menengah.

d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

- Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik, nilai realisasi capaian diperoleh dari:
  - Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 1551,26 dengan jaringan jalan terpanjang terdapat di Kecamatan Pitu Riwa dengan pangajang jalan total 275,86 Km.
  - Proses pembangunan jalan dilakukan secara bertahap di setiap tahunnya dan belum didukung adanya jumlah alat berat yang memadai serta tenaga teknis di lapangan yang belum mencukupi.
  - Adanya perencanaan yang lebih mendetail dan terinci sehingga pencapaian kinerja dapat terpenuhi.
- Persentase Jembatan Kondisi Baik, nilai realisasi capaian diperoleh dari:
  - Terlaksananya pembangunan Drainase/Gorong gorong



- Terlaksananya Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong
- Proporsi Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik dikarenakan meningkatnya pengelolaan jaringan irigasi secara efektif dan merata pada bagian hulu dan hilir serta pengembangan jaringan irigasi kewenangan kabupaten.

**e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

**Tabel 3.29**  
**Efisiensi Pengguna Sumber Daya sasaran 6**

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi yang Berkualitas	Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik Dengan Kecepatan	100	100	0
	Persentase Jembatan dalam Kondisi baik	100	100	0
	Persentase Irigasi kabupaten dalam kondisi baik	100	100	0

Rata-rata penyerapan anggaran pada tahun 2019 sebesar 100% dari total anggaran yang dialokasikan. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% maka tingkat efisiensi sebesar 0%

**f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan**

1. Pembangunan jalan dan jembatan dengan kegiatan pembangua jalan dan jembatan;
2. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong;
3. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong;
4. Pogram pemeliharaan jalan dan jembatan dengan rehabilitas/pemeliharaan;
5. Program Pengembangan Wilayah strategis dan cepat tumbuh dengan.
6. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan pengairan;
7. Program penyediaan air baku;
8. Program Pengendalian banjir.



**Sasaran 8 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**

- a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.30  
Target Capaian Indikator Kinerja sasaran 8

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
		Target	Realisasi	
1 Indeks Lingkungan Hidup	%	73.33	-	-
Rata-rata capaian kinerja				

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang

Dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang

Belum ada dalam penentuan dan perumusan Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD Kabupaten, sehingga rata-rata capaian kinerja dan realisasi tidak dapat ditentukan.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.31  
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 8

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	-	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja							

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang

Belum ada dalam penentuan dan perumusan Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD Kabupaten, sehingga rata-rata capaian kinerja dan realisasi tidak dapat ditentukan.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengantahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.



Tabel 3.32  
Perbandingan Target Realisasi sasaran 8  
dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Rp	-	-

d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Belum ada dalam penentuan dan perumusan Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD Kabupaten, sehingga menyulitkan dalam perhitungan pencapaian kinerja sasaran.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.33  
Efisiensi Pengguna Sumber Daya sasaran 8

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	-	-

f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Belum adanya inidktor kinerja pada RPJMD sehingga untuk program dan kegiatan belum bisa mengukur tingkat keberhasilan pada sasaran ini

**Sasaran 9 : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah**

a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.34  
Target Capain Indikator Kinerja sasaran 9

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
		Target	Realisasi	
1 Nilai sakisip	%	51.77	55.33	100
2 Opini Laporan Keuangan	%	WTP	WTP	100
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>				<b>100</b>

Sumber data : - Bagian Organisasi Kabupaten Sidenreng Rappang

Dan Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang



Dari 2 Indikator kinerja yang mendukung sasaran 7 Meningkatnya kinerja pemerintah daerah, 2 indikator telah mencapai target. Rata rata Capaian Kinerja pada sasaran ini sebesar 114.66%

**b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Tabel 3.35

**Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 9**

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1 Nilai SAKIP	Nilai	51.77	51.77	55.33	50	50	100
2 Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	100	100	100
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>					<b>75</b>	<b>75</b>	<b>100</b>

Sumber data : - Bagian Organisasi Kabupaten Sidenreng Rappang

Dan Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 indikator sasaran Meningkatnya kinerja pemerintah daerah capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 75 % pada tahun 2018 meningkat menjadi 100 % pada tahun 2019.

**c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengantahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Tabel 3.36

**Perbandingan Target Realisasi sasaran 9  
dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Nilai SAKIP	Nilai	55.33	68.78
Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP

Perbandingan rata-rata realisasi indicator kinerja sampai dengan tahun 2019 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang,yaitu untuk indikator Nilai SAKIP belum mencapai target jangka menengah dan indicator Opini laporan keuangan telah mencapai target jangka menengah.



**d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja**

Capaian kinerja sasaran pada tahun 2019 mencapai nilai 55,33 dengan predikat CC, mengalami kenaikan nilai jika dibandingkan capaian kinerja sasaran pada tahun 2017 dan 2018 mencapai nilai 55,33 dengan predikat CC dan dikategorikan cukup baik. Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten, masih ditemukan adanya inkonsistensi perencanaan mulai dari rencana strategi dengan renja, pengukuran yang masih berorientasi output dan pelaporan yang tidak sesuai PAN/RB/12/2015. maka perlu lebih meningkatkan implementasi SAKIP yang diawali dengan perbaikan dimulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi capaian kinerja.

- Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), mencapai target dikarenakan :
  - Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam transaksi penggunaan anggaran tidak ada yang mencurigakan;
  - Pelaporan keuangan telah berbasis Akrual (Accrual Basis) yaitu akuntansi yang memberikan gambaran lebih akurat dan kompleks atas kondisi keuangan organisasi, karena telah mencatat semua transaksi pengeluaran dan penerimaan kas serta jumlah hutang dan piutang;
  - Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan, telah memenuhi syarat-syarat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
  - Akses pengelolaan keuangan tertib, efisien, efektif, transparan, bertanggung jawab, laporan disusun secara tepat waktu dan laporan disusun sesuai standar yang berlaku.

**e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

**Tabel 3.37**  
**Efisiensi Pengguna Sumber Daya sasaran 9**

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	100	100	0
	Opini Laporan Keuangan	WTP	100	0



f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

➤ Indikator Nilai Sakip :

- Program Pengkoordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah dan Pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah pada kegiatan Penyusunan LKJIP Kabupaten Sidenreng Rappang.

**Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.38  
Target Capaian Indikator Kinerja sasaran 10

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
		Target	Realisasi	
1 Indeks Kepuasan Masyarakat	%	76.30	70.00	93.20
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>				<b>93.20</b>

Sumber data : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Indikator kinerja pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik menunjukkan realisasi indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 70.00 dari target 76.30 dan menghampiri capaian target yaitu sebesar 93.20 % di tahun ini.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.39  
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 10

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1 Indeks Kepuasan Masyarakat	%	68,75	68,75	70.00	70	70	93.20
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>		<b>68,75</b>	<b>68,75</b>	<b>70.00</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>93.20</b>

Sumber data : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat





Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja pada sasaran Stretgis 10 Meningkatkan kualitas pelayanan public telah mencapai target. Rata-rataCapaian kinerja pada tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 70 % meningkat menjadi 93.20% pada tahun 2019, Capaian kinerja pada tahun ini sebesar 93.20% dikategori baik.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengantahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.40  
Perbandingan Target Realisasi sasaran 10  
dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Indeks Kepuasan Masyarakat	%	70.00	75.00

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sebesar 70.00% sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 75.00, perbandingan rata-rata realisasi indicator kinerja sampai dengan tahun 2019 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut belum mencapai target.

- d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Kualitas pelayanan public masih perlu di tingkatkan sebagai bentuk siap, yang diperoleh dengan cara membandingkan persepsi pelanggan dan atas layanan yang nyata. Dalam factor pengukuran kualitas pelayanan agar pelayanan mempunyai persepsi yang baik terhadap kualitas jasa yang diberikan, maka penyediaan jasa harus mengetahui apa yang menjadi harapan konsumen, sehingga tidak terjadi perbedaan antara kinerja yang diberikan dengan harapan yang akhirnya pelanggan merasa puas dan mempersepsikan secara baik atas kualitas jasa yang diterima.

- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.41  
Efisiensi Pengguna Sumber Daya sasaran 10

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kuaitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	70.00	99.99	-29.99



f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

- a. Untuk meningkatkan keberhasilan capaian indikator sasaran diperlukan adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat antara lain :
- ~ Peningkatan kualitas perilaku (cakap, ramah dan baik) dan profesionalisme aparaturpemerintah serta pelayanan kepada masyarakat yang cepat;
  - ~ Peningkatan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik;
  - ~ Melaksanakan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP).

**Sasaran 11 : Meningkatnya keberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelaksanaan Pembangunan**

- a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.42  
Target Capaian Indikator Kinerja sasaran 11

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
		Target	Realisasi	
1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	92.87	93.09	100.23
2 Indeks Pemerdayaan Gender (IDG)	%	50.33	50.33	100
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>				<b>100.11</b>

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten sidenreng Rappang

Dari 2 Indikator kinerja yang mendukung sasaran 7 Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan telah mencapai target. Dan rata-rata Capaian Kinerja pada sasaran ini sebesar 100.11%

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.



Tabel 3.43  
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 11

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	91.32	91.51	93.09	-	-	100.23
2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	29.84	31.37	50.33	-	-	100
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>							<b>100.11</b>

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Sidenreng Rappang

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 2 indikator sasaran Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan, realisasi kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Capaian kinerja pada tahun 2017-2018 tidak terukur dikarenakan untuk target IKU ke 2 Indikator sasaran tersebut belum ada pada RPJMD 2018-2023. Maka untuk perbandingan capaian kinerja dari tahun lalu tidak dapat ditetapkan. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 untuk sasaran ini sebesar 100.11%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengantahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.44  
Perbandingan Target Realisasi sasaran 11  
dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	93.31	96.01
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	50.33	55.01

Perbandingan realisasi indicator kinerja tahun 2019 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu ke 2 indikator belum mencapai target jangka menengah.



**d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja**

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Terwujudnya Pengarusutamaan Gener**. Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan beberapa kegiatan sesuai anggaran yang tersedia, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
3. Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A);
4. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
5. Evaluasi pelaksanaan PUG;
6. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan.

**e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Tabel 3.45

Efisiensi Pengguna Sumber Daya sasaran 11

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya keberdayaan perempuan dan	Indeks Pembagunan Gender (IPG)	100.23	90.08	10.15
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	100	97.74	2.28

**f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran sasaran Terwujudnya Pengarusutamaan Gener ini adalah sebanyak 3 program dan 5 kegiatan, yaitu: keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan dengan 2 kegiatan , Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dengan 3 kegiatan dan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dengan 1 kegiatan.



**Sasaran 12 : Terwujudnya Desa Maju Dan Mandiri**

a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.46  
Target Capaian Indikator Kinerja sasaran 12

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	
		Target	Realisasi		
1	Indeks Ketahanan Sosial	%	0.7465	0.7458	100
2	Indeks Ketahanan Ekonomi	%	0.5576	0.5577	100
3	Indeks Ketahanan Lingkungan	%	0.639	0.6392	100
	<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>	<b>%</b>			<b>100</b>

Dari 3 Indikator kinerja yang mendukung sasaran 12 Terwujudnya Desa majun dan mandiri telah mencapai target. Dan rata-rata Capaian Kinerja pada sasaran ini sebesar 100%

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.47  
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 12

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)			
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	
1	Indeks Ketahanan Sosial	%	-	0.6709	0.7458	-	100	100
2	Indeks Ketahanan Ekonomi	%	-	0.5225	0.5577	-	100	100
3	Indeks Ketahanan Lingkungan	%	-	0.6526	0.6392	-	100	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa ke 3 indikator sasaran Terwujudnya Desa Maju Dan Mandiri telah mencapai target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017 belum terukur dan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 100 %, dan dikategorikan baik sekali.



- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengantahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.48  
Perbandingan Target Realisasi sasaran 12  
dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Indeks Ketahanan Sosial	%	0.7458	0.7598
Indeks Ketahanan Ekonomi	%	0.5577	0.7029
Indeks Ketahanan Lingkungan	%	0.6392	0.7027

Perbandingan realisasi indicator kinerja tahun 2019 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu ke 3 indikator belum mencapai target jangka menengah.

**d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja**

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran Meningkatkan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa ini didukung dengan adanya program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan, Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, dan Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. Indikator yang mencapai target ini ditunjang oleh anggaran yang memadai pada tahun 2019 sehingga indikator dapat terealisasi sebesar 100 Persen. Hal ini menunjukkan bahwa capaian target 100 persen pada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang dapat direalisasikan.

1. Pembinaan dan penyediaan Pokja dan PKK Desa dan kelurahan;
2. Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan Pokmas pengelolaan air bersih;
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
4. Pembinaan dan pelaksanaan BUMDES;
5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
6. Penyusunan peraturan bupati tentang desa;
7. Monitoring, evaluasi kelembagaan desa;
8. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang desa.



e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.49

Efisiensi Pengguna Sumber Daya sasaran 12

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri	Indeks Ketahanan Sosial	100	97.40	2.6
	Indeks Ketahanan Ekonomi	100	79.11	20.89
	Indeks Ketahanan Lingkungan	100	99.00	1

f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa** ini adalah sebanyak 4 program dan 9 kegiatan, yaitu:

1. program Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan;
2. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan;
3. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
4. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.

**Sasaran 13 : Meningkatkan Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat**

a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.50

Target Capaian Indikator Kinerja sasaran 13

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
		Target	Realisasi	
1. Persentase Angka Kriminalitas Per 10.000	%	15.08	11.56	123.34
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>				123.34

Sumber data : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran  
Kabupaten Sidenreng Rappang



Dari realisasi Indikator kinerja yang mendukung sasaran 13 Meningkatnya Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat telah melampaui target. Dan rata-rata Capaian Kinerja pada sasaran ini sebesar 123.34%.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.51  
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 13

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1 Persentase Angka Kriminalitas Angka per 10.000	Rp	-	15.27	11.56	-	100	123.34
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>		-	15.27	11.56	-	100	123.34

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja pada sasaran Stretgis 13 Meningkatkan kenyamanan khidupan bermasyarakat telah melampaui dari target. Rata-rataCapaian kinerja pada tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 100% meningkat menjadi 123.34% pada tahun 2019 dan dikategori baik sekali.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengantahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.52  
Perbandingan Target Realisasi sasaran 13  
dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Presentase Angka Kriminalitas per 10.000	%	11.56	12.12

Perbandingan realisasi indicator kinerja tahun 2019 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang telah mencapai target jangka menengah.





d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Mewujudkan stabilitasi keamanan dan kenyamanan di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan indicator target pada tahun 2018 adalah 15,27 % dan tahun 2019 adalah sebesar 15,08%. Angka kriminalitas pada tahun 2019 adala sebesar 385 kasus dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama adalah sebesar 316.894 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 angka kriminalitas pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 11.56%.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.53  
Efisiensi Pengguna Sumber Daya sasaran 13

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatkan Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat	Presentase Angka Kriminalitas per 10.000	123.34	97	26,34

f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan.

1. Mewujudkan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
2. Pemeliharaan dan pencegahan tindak Kriminal;
3. Peningkatan Pemberantas Penyakit Masyarakat.
4. Peningkatan pemahaman dan penegakan perda.

**Sasaran 14 : Meningkatkan Penerapan Nilai- Nilai Budaya Lokal**

a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.54  
Target Capaian Indikator Kinerja sasaran 14

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
		Target	Realisasi	
1 Presentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar budaya yang dilestarikan	%	50	50	100
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>				<b>100</b>

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang



Dari realisasi Indikator kinerja yang mendukung sasaran 14 Meningkatnya penerapan nilai-nilai budaya lokal telah mencapai target. Dan rata-rata Capaian Kinerja pada sasaran ini sebesar 100%.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.55

Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 14

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1 Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	-	-	-	-	-	100
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>							<b>100</b>

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang

Capaian kinerja untuk indikator ini, baru diukur pada tahun 2019 sebagai indikator sasaran, dengan rata-rata capaian untuk tahun 2019 sebesar 100 %.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengantahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.56

Perbandingan Target Realisasi sasaran 14  
dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang dilestarikan	%	50	100

Perbandingan realisasi indicator kinerja tahun 2019 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang belum mencapai target jangka menengah.



d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Pencapaian indikator pada **Meningkatnya Penerapan Nilai-nilai Budaya Lokal** telah mencapai target pada tahun 2019, tp dibandingkan dengan realisasi target jangka menengah masih lebih jauh dari target, hal disebabkan oleh karena adanya penetapan budaya yang masih sementara berjalan.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.57

Efisiensi Pengguna Sumber Daya sasaran 14

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya penerapan Nilai-Nilai Budaya Lokal dan sarana prasarana olahraga	Presentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar budaya Yang dilestarikan	100	95.87	4.13

f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Pencapaian indikator pada **Meningkatnya Penerapan Nilai-nilai Budaya Lokal** telah mencapai target pada tahun 2019, Namun dibandingkan dengan realisasi target jangka menengah masih lebih jauh dari target, hal disebabkan oleh karena adanya penetapan budaya yang masih sementara berjalan.

### 3.3 REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mendukung terwujudnya pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka menunjang tercapainya sasaran strategis dan indikator kinerja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel.3.58

REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
<b>1. INDEKS PENDIDIKAN</b>				
-	Program Pendidikan Anak Usia Dini	3.266.181.000,-	3.201.778.000,-	98.18
-	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	88.372.542.000,-	87.842.897.557,-	99.40
-	Program Pendidikan Non Formal	1.831.600.000,-	1.539.384.000,-	84.05
-	Program Peningkatan Kualifikasi dan mutu Pendidik dan tenaga kependidikan	989.988.500,-	945.659.746,-	94.66
<b>2. INDEKS KESEHATAN</b>				
-	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	3.489.745.000,-	3.035.087.324,-	86.97
-	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	16.368.278.600,-	10.812.345.701,-	66.06
-	Program Pengawasan Obat dan Makanan	191.044.000,-	104.061.296,-	54.47
-	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	91.032.000,-	89.821.600,-	98.67
-	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1.033.475.500,-	601.316.120,-	58.18
-	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	404.475.000,-	330.490.000,-	81.71
-	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular	1.549.948.000,-	1.291.865.619,-	83.35
-	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringan	14.488.475.900,-	9.084.189.120,-	62.70
-	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah sakit Jiwa/ Rumah sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	3.668.000.000,-	3.328.008.845,-	90.73
-	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	24.355.705.000,-	23.371.219.194,-	95.96
-	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	823.000.000,-	356.813.000,-	43.36



-	Program Pelayanan Kesehatan Anak Balita	75.000.000,-	72.700.000,-	96.93
-	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	12.000.000,-	11.296.000,-	94.13
<b>3. PERTUMBUHAN PDRB</b>				
-	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	2.322.890.000,-	2.236.766.600,-	96.29
-	Program Peningkatan Produksi Pertanian	1.808.258.100,-	1.737.212.815,-	96.07
-	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	2.380.216.000,-	2.273.530.812,-	95.52
-	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	911.667.800,-	902.365.229,-	98.98
-	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	391.500.000,-	338.323.475,-	86.36
-	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	229.500.000,-	225.893.550,-	98.43
-	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1.009.380.800,-	994.732.376,-	98.55
-	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	383.334.000,-	365.846.320,-	95.44
-	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	3.509.983.000,-	3.462.898.666,-	98.66
-	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	2.333.000.000,-	2.309.904.040,-	99.01
<b>4. ANGKA KEMISKINAN</b>				
-	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	72.450.000,-	61.984.500,-	85.55
<b>5. ANGKA KEMISKINAN</b>				
-	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.698.776.000,-	1.434.130.532,-	84.42
-	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	292.952.000,-	291.794.712,-	99.80
-	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	167.358.500,-	150.162.100,-	89.72



-	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	750.000.000,-	670.708.801,-	90.22
-	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	151.141.000,-	108.863.002,-	72.03
-	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	263.850.000,-	234.144.800,-	88.74
<b>6. NILAI INVESTASI</b>				
-	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	105.000.000,-	104.727.150,-	99.74
-	Program Peningkatan Iklim dan Investasi dan Realisasi Investasi	35.000.000,-	35.000.000,-	100
-	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan	387.759.000,-	283.827.000,-	77.49
-	Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan	164.465.000,-	163.134.002,-	99.00
<b>7. PERSENTASE PANJANG JALAN DALAM KONDISI BAIK</b>				
-	Program Pembangunan Jalan	41.187.328.000,-	38.930.919.318,-	94.69
-	Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong	458.535.000,-	445.958.850,-	86.95
-	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	2.638.244.000,-	2.293.881.200,-	86.95
-	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	17.636.086.500,-	16.935.335.314,-	96.03
-	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	843.311.000,-	778.927.000,-	92.37
-	Program Air Minum (Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku)	6.147.732.000,-	5.424.313.996,-	88.23
-	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	5.195.109.000,-	4.898.607.345,-	94.29
-	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	4.180.281.500,-	3.992.056.560,-	95.50
-	Program Pemanfaatan Ruang	776.060.000,-	746.795.000,-	96.23
-	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	595.915.000,-	557.927.150,-	93.63



8. PERSENTASE JEMBATAN DALAM KONDISI BAIK				
-	Pembangunan Jembatan	2.323.587.000,-	2.268.094.250,-	97.61
-	Program Sal.Drainase/Gorong-gorong	4.267.130.000,-	3.927.660.650,-	92.04
-	Program Pengembangan Pengelolaan dan Konsevasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Kawasan Program	299.961.000,-	296.040.700,-	98.69
-	Program Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	9.434.925.000,-	9,403.017.742,-	99.66
-	Program perencanaan pengawasan Pengujian dan Pengendalian Mutu	58.587.000,-	56.709.500,-	96.80
9. PERSENTASE IRIGASI KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK				
-	Program Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan lainnya	14.896.055.000,-	13.460.924.247,-	90.37
-	Program Penyediaan Air baku	4.283.782.000,-	3.700.321.350,-	86.38
10. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP				
-	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.819.328.000,-	1.764.617.200,-	96.99
-	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	4.239.378.000,-	3.758.743.890,-	88.66
-	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan	116.200.000,-	105.604.800,-	90.88
-	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	308.796.000,-	284.354.637,-	92.08
11. NILAI SAKIP				
	Program Peningkatan pengembangan system pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	55.350.000,-	49.150.000,-	92.13
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1698.776.000,-	1.434.130.532,-	84.42
12. OPINI LAPORAN KEUANGAN				
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	88.355.000,-	88.355.000,-	100



13. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT				
	Program Penataan Admistrasi Kependudukan	2.383.037.000,-	2.284.806.050,-	95.88
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	100.586.000,-	67.215.500,-	66.82
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	69.128.628.000,-	60.701.006.633,-	87.80
	Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan	164.465.000,-	163.134.000,-	99.00
	Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	106.949.800,-	93.114.800,-	87.06
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	575.000.000,-	560.064.704,-	97.40
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	703.200.000,-	683.862.318,-	97.25
14. INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)				
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	428.291.000,-	385.815.500,-	90.08
15. INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)				
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	105.241.000,-	99.096.000,-	94.45
16. INDEKS KETAHANAN SOSIAL				
	Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat Pedesaan	575.000.000,-	560.064.704,-	97.00
17. INDEKS KETAHANAN EKONOMI				
	Program Pengembangan lembaga Ekonomi pedesaan	35.000.000,-	27.689.370,-	79.11
18. INDEKS KETAHANAN LINGKUNGAN				
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	703.200.000,-	683.862.318,-	97.25
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	30.000.000,-	29.700.000,-	99.00
	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	4.397.113.000,-	4.154.349.377,-	94.47





19. PERSENTASE ANGKA KRIMINALITAS PER 10.000				
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	6.384.495.000,-	6.141.221.278,-	96.19
	Program Peningkatan Pemahaman dan Penegakan Peraturan	467.781.000,-	443.335.000,-	94.77
20. PERSENTASE BENDA, SITUS DAN KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN				
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1.315.985.000,-	1.261.572.919,-	95.87

### 3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2019

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2019, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2.955.018.223.846,67. Berpedoman pada proyeksi indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi - strategi kebijakan fiskal sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 – 2023 diarahkan kepada :

1. Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional;
2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi belanja;
3. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Upaya - upaya efektif dalam penggalan sumber - sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat sehingga nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja, diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat disebar, mengingat struktur ekonomi lebih banyak di dominasi oleh sektor primer, maka sudah saatnya dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber - sumber pendapatan daerah yang berbasiskan pada sektor primer dan mata rantainya. Pendapatan Daerah dikelompokkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah,



Pendapatan Transfer dan Lain – Lain Pendapatan Yang Sah yang masing - masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)  
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
<b>4</b>		<b>1.291.764.761.000,00</b>	<b>1.236.965.476.185,56</b>	<b>95,76</b>	<b>1.192.419.015.591,23</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA</b>	<b>143.444.241.000,00</b>	<b>125.729.748.418,72</b>	<b>87,65</b>	<b>115.904.953.769,23</b>
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	31.999.433.000,00	33.619.377.007,00	105,06	29.102.296.021,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	16.435.293.000,00	15.927.864.732,00	96,91	12.110.187.560,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	5.738.586.000,00	4.711.090.062,00	82,09	4.628.436.158,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	89.270.929.000,00	71.471.416.617,72	80,06	70.064.034.030,23
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER – LRA</b>	<b>1.096.424.689.000,00</b>	<b>1.065.607.019.192,84</b>	<b>97,19</b>	<b>1.034.096.299.655,00</b>
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	963.649.904.000,00	938.071.387.429,00	97,35	910.640.882.073,00
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak – LRA	12.383.749.000,00	10.110.550.637,00	81,64	12.434.487.305,00
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA	7.829.363.000,00	5.039.265.719,00	64,36	4.642.152.551,00
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	649.569.016.000,00	649.569.016.000,00	100,00	610.506.232.000,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	240.753.559.000,00	228.918.012.444,00	95,08	68.568.614.612,00
4.2.1.5	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	22.610.223.000,00	14.856.260.314,00	65,71	111.849.653.605,00
4.2.1.6	Dana Alokasi Khusus Penugasan	20.525.352.000,00	19.772.628.465,00	96,33	102.639.742.000,00
4.2.1.7	Dana Alokasi Khusus Afirmasi	9.978.642.000,00	9.805.653.850,00	98,27	0,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LRA	65.498.274.000,00	65.498.274.000,00	100,00	72.548.606.600,00
4.2.2.3	Dana Penyesuaian – LRA	65.498.274.000,00	65.498.274.000,00	100,00	72.548.606.600,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	67.276.511.000,00	62.037.357.763,84	92,21	50.906.810.982,00
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA	52.919.669.000,00	46.897.390.170,00	88,62	37.676.683.558,00
4.2.3.2	Pendapatan Bagi hasil Lainnya – LRA	14.356.842.000,00	15.139.967.593,84	105,45	13.230.127.424,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LRA</b>	<b>51.895.831.000,00</b>	<b>45.628.708.574,00</b>	<b>87,91</b>	<b>42.417.762.167,00</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah – LRA	40.667.331.000,00	36.801.377.074,00	90,48	35.517.887.751,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)  
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019

4.3.3	Pendapatan Lainnya – LRA	11.228.500.000,00	8.827.331.500,00	78,62	6.899.874.416,00
-------	--------------------------	-------------------	------------------	-------	------------------



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)**  
**Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019**

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
<b>5</b>		<b>1.154.503.671.145,00</b>	<b>1.086.115.206.569,86</b>	<b>94,08</b>	<b>1.093.702.294.319,73</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>869.068.920.145,00</b>	<b>821.316.614.437,00</b>	<b>94,51</b>	<b>774.319.419.390,73</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	527.089.996.000,00	509.426.478.946,00	96,65	489.087.069.012,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	330.429.924.000,00	301.904.880.573,00	91,37	251.450.745.557,73
5.1.3	Belanja Bunga	1.554.000.000,00	1.296.714.918,00	83,44	1.409.033.471,00
5.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	983.424.000,00
5.1.5	Belanja Hibah	7.370.000.000,00	7.096.040.000,00	96,28	31.389.147.350,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.625.000.000,00	1.592.500.000,00	60,67	0,00
5.1.7	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	145,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>282.434.751.000,00</b>	<b>262.446.108.782,86</b>	<b>92,92</b>	<b>317.750.314.929,00</b>
5.2.1	Belanja Modal Tanah	3.093.771.000,00	2.413.571.600,00	78,01	4.317.426.800,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.120.425.517,00	28.458.776.738,00	91,45	17.664.567.649,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	119.915.328.000,00	111.699.662.116,00	93,15	77.401.463.275,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	120.848.049.400,00	113.482.438.604,86	93,91	209.904.905.688,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.457.177.083,00	6.391.659.724,00	85,71	8.461.951.517,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>2.352.483.350,00</b>	<b>78,42</b>	<b>1.632.560.000,00</b>
5.3.1	Belanja Tak Terduga	3.000.000.000,00	2.352.483.350,00	78,42	1.632.560.000,00
<b>6</b>		<b>147.034.610.855,00</b>	<b>138.318.905.088,00</b>	<b>94,07</b>	<b>92.205.434.597,00</b>
<b>6.1</b>	<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>	<b>745.881.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.564.400,00</b>
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	745.881.855,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	8.564.400,00
<b>6.2</b>	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>146.288.729.000,00</b>	<b>138.318.905.088,00</b>	<b>94,55</b>	<b>92.196.870.197,00</b>
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	145.450.327.000,00	137.675.053.962,00	94,65	91.427.592.225,00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	838.402.000,00	643.851.126,00	76,80	769.277.972,00
		<b>(9.773.521.000,00)</b>	<b>12.531.364.527,70</b>	<b>(128,15)</b>	<b>6.511.286.674,50</b>



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)  
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
7					
7.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>14.836.521.870,28</b>	<b>14.836.521.870,28</b>	<b>100,00</b>	<b>10.599.321.693,78</b>
7.1.1	Penggunaan SILPA	14.836.521.870,28	14.836.521.870,28	100,00	10.599.321.693,78
7.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.063.000.870,28</b>	<b>3.193.086.498,00</b>	<b>63,07</b>	<b>2.274.086.498,00</b>
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	1.309.000.000,00	919.000.000,00	70,21	0,00
7.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	3.754.000.870,28	2.274.086.498,00	60,58	2.274.086.498,00
		<b>9.773.521.000,00</b>	<b>11.643.435.372,28</b>	<b>119,13</b>	<b>8.325.235.195,78</b>
		<b>0,00</b>	<b>24.174.799.899,98</b>	<b>0,00</b>	<b>14.836.521.870,28</b>

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang



## BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran – sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 14 (empat belas) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh ) Indikator Kinerja Utama,

Hampir keseluruhan indicator tidak dapat terukur, sehingga kinerja penetapan indicator untuk tahun 2019 belum bisa dibandingkan dengan tahun lalu maka sulit menentukan perbandingan rata –rata capaian kinerja untuk tahun ini.

Permasalahan yang kami hadapi :

1. Ada ketidaktepatan dalam penentuan dan perumusan Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD Kabupaten, sehingga menyulitkan dalam perhitungan pencapaian kinerja sasaran, oleh karena itu diperlukan reviu atas Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD Kabupaten;

2. Ada ketidaktepatan dalam penentuan target pada Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD Kabupaten, sehingga menyulitkan dalam perhitungan pencapaian kinerja sasaran karena targetnya terlalu rendah, oleh karena itu diperlukan reviu atas Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD Kabupaten;

3. Perlu adanya review dokumen perencanaan mulai dari RPJMD, Renstra dan dokumentasi perencanaan lainnya.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan , maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi Pemerintah ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Dalam rangka perbaikan system monitoring, evaluasi, pengendalian capaian kinerja dan pelaporan kinerja, maka upaya pengembangan terhadap e-Sakip perlu terus dilakukan terutama berkaitan dengan penambahan fitur dan aplikasi baru yang mampu meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja di masa yang akan datang.



Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 - 2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2019, belum mencapai target. Masih terdapat indikator sasaran strategis yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan, akan terus kami upayakan melalui kerja keras secara sinergi, inovasi dan kolaborasi bersama masyarakat dan semua pihak.

Pangkajene Sidenreng, 31 Maret 2020

**BUPATI SIDENRENG RAPPPANG**



**H. DOLLAH MANDO**





# *Lampiran*



## PENGUKURAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi 2017	Capaian Kinerja (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	1	Indeks Pendidikan	%	62.69	62.02	98.93
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2	Indek Kesehatan	%	75.41	69.59	92.28
3	Meningkatnya produktivitas sector-sektor perekonomian daerah	3	Pertumbuhan PDRB	%	5.27	4.65	111.76
4	Menurunnya tingkat kemiskinan	4	Angka Kemiskinan	%	4.94	4.79	103.03
5	Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan	5	Gini Ratio	%	0.306	0.284	107.18
6	Meningkatnya pertumbuhan investasi dan daya saing pariwisata daerah	6	Nilai Investasi	Rp (Milyar)	157.002	3.035.750	193.56
7	Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi yang berkualitas	7	Persentase Jalan dalam kondisi baik	%	52	53.42	102.7
		8	Persentase Jembatan dalam kondisi baik	%	76.9	76.9	100
		9	Proporsi jaringan Irigasi dalam kondisi baik	%	55	77.71	141
8	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup(IKLH)	%	73.33	0	0
9	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah	11	Nilai Sakip	Nilai	CC	CC	100
		12	Opini laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	100



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi 2017	Capaian Kinerja (%)
1	2	3		4	5	6	7
10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan public	13	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	76.30	70.00	93.20
11	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Anak dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan	14	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	92.87	93.09	100.23
		15	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	50.33	50.37	100
12	Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri	16	Indeks Ketahanan Sosial	%	0.74	0.74	100
		17	Indeks Ketahanan Ekonomi	%	0.55	0.55	100
		18	Indeks Ketahanan Lingkungan	%	0.63	0.63	100
13	Meningkatnya Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat	19	Persentase Angka Kriminalitas Per 10.000	%	15.08	11.56	123.34
14	Meningkatnya penerapan Nilai-Nilai Budaya Lokal dan Sarana Prasarana Olahraga	20	Prsentase Benda, Situs dan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	50	50	100



## BUPATI SIDENRENG RAPPANG

### PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. H. DOLLAH MANDO**

Jabatan : **Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pangkajene Sidenreng, Agustus 2019

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

H. DOLLAH MANDO



## PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan.	1	Indeks Pendidikan.	62.69
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	2	Indeks Kesehatan.	75.41
3	Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah.	3	Pertumbuhan PDRB.	5.27
4	Menurunnya tingkat kemiskinan.	4	Angka Kemiskinan.	4.94
5	Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan.	5	Gini Ratio.	0.306
6	Meningkatnya pertumbuhan investasi dan daya saing pariwisata daerah.	6	Nilai Investasi (Juta Rupiah)	157.052
7	Meningkatnya infrastruktur ekonomi yang berkualitas.	7	Presentase panjang jalan dalam kondisi baik.	52
		8	Presentase jembatan dalam kondisi baik.	76.9
		9	Presentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik.	55
8	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	10	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH).	73.33
9	Meningkatnya kinerja pemerintah daerah.	11	Nilai SAKIP	51.77
		12	Opini laporan keuangan	WTP
10	Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	13	Indeks kepuasan masyarakat.	76.30
11	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.	14	Indeks pembangunan gender (IPG).	92.87
		15	Indeks pemberdayaan gender (IDG).	50.33
12	Terwujudnya desa maju dan mandiri.	16	Indeks ketahanan sosial.	0.7465
		17	Indeks ketahanan ekonomi.	0.5576
		18	Indeks ketahanan lingkungan.	0.6390
13	Meningkatnya kenyamanan kehidupan bermasyarakat.	19	Presentase angka kriminalitas per 10.000.	15.08
14	Meningkatnya penerapan nilai-nilai budaya lokal dan sarana prasarana olahraga.	20	Presentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.	50



	<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>
1.	Program Pendidikan Anak Usia Dini.	Rp	3.266.181.000
2.	Program Wajib Belajar Sembilan Tahun.	Rp	88.372.542.000
3.	Program Pendidikan Non Formal.	Rp	1.831.600.000
4.	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.	Rp	671.993.500
5.	Program BOS (Biaya Operasional Sekolah)	Rp	33.973.241.000
6.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Rp	272.158.000
7.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp	1.043.827.000
8.	Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan.	Rp	3.489.745.000
9.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat.	Rp	16.368.278.000
10.	Program Pengawasan Obat Dan Makanan.	Rp	191.044.000
11.	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat.	Rp	91.032.000
12.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat.	Rp	1.033.475.500
13.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat.	Rp	404.475.000
14.	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular.	Rp	1.549.948.000
15.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.	Rp	100.586.000
16.	Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.	Rp	14.488.475.900
17.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata.	Rp	3.668.000.000
18.	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.	Rp	36.855.583.000
19.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita.	Rp	75.000.000
20.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia.	Rp	12.000.000
21.	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.	Rp	823.000.000



22.	Program Prima Kesehatan.	Rp	30.000.000
23.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat.	Rp	2.519.500.000
24.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.	Rp	372.450.000
25.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata.	Rp	5.059.962.000
26.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.	Rp	317.600.000
27.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata.	Rp	4.968.867.000
28.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.	Rp	43.510.915.000
29.	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong.	Rp	458.535.000
30.	Program Pembanguna Turap / Talud / Bronjong.	Rp	2.632.244.000
31.	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan.	Rp	17.636.086.500
32.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya.	Rp	14.896.055.000
33.	Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku.	Rp	4.283.782.000
34.	Program Pengembangan, Pengelolaan, Dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.	Rp	59.233.000
35.	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong.	Rp	4.267.130.000
36.	Program Pengembangan, Pengelolaan, Dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.	Rp	299.961.000
37.	Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Air Minum dan Air Limbah.	Rp	9.434.925.000
38.	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.	Rp	1.756.922.000
39.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp	1.930.904.000



40.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp	308.796.000
41.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp	31.596.000
42.	Program peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Rp	531.001.000
43.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.	Rp	2.226.527.300
44.	Program Pengembangan, Pengelolaan, Dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.	Rp	4.310.488.000
45.	Program Pengembangan Budidaya perikanan	Rp	1.009.380.800
46.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Rp	383.334.000
47.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Rp	2.322.890.000
48.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Rp	2.380.216.000
49.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Rp	1.808.258.100
50.	Program pemberdayaan penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Rp	911.667.800
51.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Rp	229.500.000
52.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Sragetis dan Cepat Tumbuh	Rp	292.384.500
53.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Rp	167.358.500
54.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	1.698.776.000
55.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp	743.411.500
56.	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Rp	151.141.000
57.	Program Perencanaan Prasarana wilayah dan sumber daya alam	Rp	263.850.000
58.	Program Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp	151.141.000





59.	Program Pemeliharaan Kantratibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rp	605.842.000
60.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp	2.990.684.000
61.	Program Pemeliharaan Kantratibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rp	328.289.000
62.	Program Peningkatan Pemahaman dan Penegakan Peraturan Daerah	Rp	467.781.000
63.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp	72.450.000
64.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	178.000.000
65.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp	823.800.000
66.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil menengah	Rp	2.333.000.000
67.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Rp	3.509.983.000
68.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp	105.241.000
69.	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Rp	428.291.000
70.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rp	575.000.000
71.	Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Rp	35.000.000
72.	Program peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Rp	703.200.000
73.	Program peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp	30.000.000
75.	Program peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp	35.000.000
76.	Program peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan	Rp	387.759.000



Pelayanan Perizinan

77.	Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan	Rp	164.465.000
78.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rp	384.949.500
79.	Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	503.000.000
80.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksana Kebijakan KDH	Rp	856.903.600
81.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp	312.000.000
82.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksana Kebijakan KDH	Rp	450.277.000
83.	Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	6.462.897.000
84.	Program pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Rp	612.164.000

Pangkajene Sidenreng, Agustus 2019  
**BUPATI SIDENRENG RAPPANG**

  
**H. DOLLAH MANDO**



## RENCANA KINERJA TAHUN 2020 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	1	Indeks Pendidikan	%	63.61
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2	Indek Kesehatan	%	75.7
3	Meningkatnya produktivitas sector-sektor perekonomian daerah	3	Persentase Pertumbuhan PDRB	%	5.53
4	Menurunnya tingkat kemiskinan	4	Angka Kemiskinan	%	4.90
5	Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan	5	Gini Ratio	%	0.323
6	Meningkatnya pertumbuhan investasi dan daya saing pariwisata daerah	6	Nilai Investasi	Rp (Milyar)	157.052
		7	Jumlah Objek Wisata Baru	objek	1
7	Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi yang berkualitas	8	Persentase Jalan dalam kondisi baik	%	54
		9	Persentase Jembatan dalam kondisi baik	%	78
		10	Proporsi jaringan Irigasi dalam kondisi baik	%	60
8	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup(IKLH)	%	73.33
9	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah	12	Nilai Sakip	Nilai	56.75
		13	Opini laporan Keuangan	Opini	WTP



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target
1	2	3		4	5
10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan public	14	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	76.61
11	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Anak dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan	15	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	93.09
		16	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	33.37
12	Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri	17	Indeks Ketahanan Sosial	%	0.74
		18	Indeks Ketahanan Ekonomi	%	0.55
		19	Indeks Ketahanan Lingkungan	%	0.63
13	Meningkatnya Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat	20	Persentase Angka Kriminalitas Per 10.000	%	14.41
14	Meningkatnya penerapan Nilai-Nilai Budaya Lokal dan Sarana Prasarana Olahrag	21	Prsentase Benda, Situs dan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	62.5
		22	Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Terpadu	sarana	2



**SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
BAGIAN ORGANISASI  
SUB BAGIAN REFORMASI BIROKRASI DAN KINERJA SETDA**

Nomor SOP	
Tgl Pembuatan	06 September 2019
Tgl Revisi	
Tgl Efektif	
Disahkan oleh	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  <b>SUDIRMAN BUNGLI, S.IP, M.Si</b> Nip.19700827 199009 1 002
Nama SOP	<b>PENGUMPULAN DATA KINERJA</b>

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</li><li>Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah</li><li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Menguasai alur persuratan</li><li>Mampu mengklasifikasikan surat menurut jenisnya</li><li>Sarjana Hukum</li></ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan Perlengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>SOP Pembuatan LAKIP</li><li>SOP Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Tim</li><li></li><li></li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Buku Agenda</li><li>Ekspedisi</li><li>Lembar Disposisi</li></ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
Bila penyusunan tidak dilaksanakan, maka data laporan kinerja tidak dapat disajikan dengan baik	



Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
	Tim LAKIP	kabag	Kasubbag	Staf Sub Bagian	Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Memerintahkan Kasubag untuk melaksanakan pengumpulan data kinerja Sekretariat Daerah					Peraturan yang ada	5 menit	Perintah	
1. Mebuat surat permintaan data kinerja .					Bahan-bahan / materi sesuai Peraturan yang ada	30 menit	Tersedia kelengkapan yang akan digunakan dan dijadikan pedoman dalam pengumpulan bahan/materi	
2. Mengirim surat permintaan data kinerja.					Bahan-bahan / materi sesuai Peraturan yang ada	15 menit	Bahan/materi telah selesai dan siap dibagikan Tim penyusunan lakip	
3. Menerima dan mengumpulkan data kinerja dari masing-masing bagian.					Daftar bahan/Materi Pulpen.	120 menit	Bahan/materi telah tersedia	
4. Memeriksa, merekap data yang diterima untuk di olah menjadi laporan Kinerja					Bahan/materi	15 menit	Laporan kinerja Siap untuk disusun	



### DAFTAR PENGHARGAAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2019

NO	NAMA PENGHARGAAN	ASAL PENGHARGAAN	WAKTU PENYERAHAN	TEMPAT PENYERAHAN	PENERIMA
1	Adipura Kategori Kota Kecil	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.	Senin (14/1/2019)	Gedung Manggala Wanabakti Jl Gatot Subroto Jakarta Pusat	Bupati Sidrap, H Dollah Mando
2	Damkar Juara Umum II Skill Firefighting Competition tingkat Nasional.	Kemendagri	Rabu (6/3/2019)	Stadion Kaharuddin Nasution Rumbai, Pekanbaru, Provinsi Riau	Bupati Sidrap, H Dollah Mando
3	Penghargaan perlindungan pegawai pemerintah bukan Aparatur Sipil Negara dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan.	Kamis (2/5/2019)	Lapangan Kompleks SKPD Sidrap	Bupati Sidrap, H Dollah Mando
4	Akreditasi Paripurna untuk Puskesmas Pangkajene.	Komisi Akreditasi Kemenkes RI	Selasa (14/5/2019)		
5	Penghargaan Kinerja Optimal Menindaklanjuti Temuan Inspektorat Daerah TA 2015-2018	Pemprov Sulsel.			
6	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2019	BPK	Jumat (24/5/2019)	Kantor BPK Sulsel, Jalan A P Pettarani, Makassar.	Bupati Sidrap, H Dollah Mando
7	Penghargaan Kapabilitas APIP Level 3	BPKP Sulsel.			
8	Anugerah Pendidikan Indonesia 2019	PP Ikatan Guru Indonesia.	Jumat (20/9/2019)	Planerry Hall Jakarta Convention Center	Bupati Sidrap, H Dollah Mando
9	Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) 2019	Kementerian PPPA RI.	Selasa (23/7/2019) malam	Hotel Four Points, Makassar	Wakil Bupati Sidrap, H Mahmud Yusuf



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)  
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019

10	Penghargaan Pelayanan Pensertifikatan dan Penertiban Aset	Kementerian ATR/BPN	Selasa (24/9/2019)	Halaman Rujab Gubernur Sulsel, Makassar	Bupati Sidrap, H Dollah Mando
11	Penghargaan Program Inovasi Pemerintah Daerah dalam Mendorong Percepatan Akses Keuangan Daerah	TPKAD OJK Regional VI Sulawesi, Maluku, dan Papua.	Sabtu (26/10/2019)	Anjungan Pantai Losari Makassar	Kasubag Produksi Bagian Perekonomian dan SDA, Sutiara
12	Penghargaan Kategori Penggerak Akses Keuangan Daerah	TPKAD OJK Regional VI Sulawesi, Maluku, dan Papua.	Sabtu (26/10/2019)	Anjungan Pantai Losari Makassar	Kasubag Produksi Bagian Perekonomian dan SDA, Sutiara
13	Penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2018 dengan Opini Tanpa Pengecualian (WTP)	Menteri Keuangan RI	Selasa (29/10/2019)	Balai Diklat Keuangan Makassar	Bupati Sidrap, H Dollah Mando
14	Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sulsel 2019 (4 sekolah) : SDN 4 Pangkajene, SDN 15 Tanrutedong, SDN 15 Pangkajene dan SDN 3 Arawa	DLH Pemprov Sulsel.	Rabu (30/10/2019)		Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DPRKP2LH) Sidrap, Hj Aryani
15	Penghargaan Dedikasi Sektor Kesehatan di Hari Kesehatan Nasional ke-55 untuk Hj Mulyani Dollah	Pemprov Sulsel	Selasa (12/11/2019)	Rujab Gubernur Sulsel	Sekretaris Forum Kabupaten Sehat Sidrap, Hj Hasmi
16	Penghargaan Kabupaten Sehat Kategori Tertinggi, Swasti Saba Wistara	Kemenkes RI	Selasa (19/11/2019)	Gedung Sasana Bakti Praja Kemendagri RI	Bupati Sidrap, H Dollah Mando
17	Penghargaan Implementasi Green Hospital untuk RSUD Arifin Nu'mang	Kemenkes RI	Rabu (20/11/2019)	Gedung dr Adhyatma, Kementerian Kesehatan	Direktur RSUD Arifin Nu'mang, dr Budi Santoso





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)  
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019

18	Penghargaan atas kepedulian Bupati pada Pendidikan, pada Hari Guru Nasional	PGRI Sulsel	Senin (25/11/2019)	Lapangan Sumpang Binangae, Kabupaten Barru	Bupati Sidrap, H Dollah Mando
19	Penghargaan Daerah Outcome Kesehatan Kelompok Dua Terbaik dalam Indeks Kelola Kinerja dan Efektivitas Pengelolaan APBD	Katadata Insight Center dan Kemendagri RI	Kamis malam (28/11/2019)	XXI Ballroom Djakarta Theatre, Jakarta Pusat	Bupati Sidrap, H Dollah Mando
20	TP PKK Juara lomba Poco-Poco Kategori Unik pada Peringatan Hari Gerak Kesatuan (HKG) PKK Sulsel	TP PKK Sulsel	Selasa (3/12/2019)	Hotel Four Point Sheraton, Makassar	Ketua TP PKK Sidrap, Hj Mulyani Dollah
21	TP PKK Juara I Lomba Posyandu Lansia pada Peringatan Hari Gerak Kesatuan (HKG) PKK Sulsel	TP PKK Sulsel	Selasa (3/12/2019)	Hotel Four Point Sheraton, Makassar	Ketua TP PKK Sidrap, Hj Mulyani Dollah
22	Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia pada tahun 2018	Kementerian Hukum dan HAM	Selasa (10/12/2019)	Gedung Merdeka Jl Asia Afrika, Kota Bandung, Jawa Barat	Plt Asisten Administrasi Umum Sidrap, Andi Muhammad Faisal
23	Training Award 2019 dari Pemerintah Provinsi Sulsel	Pemerintah Provinsi Sulsel	Selasa (10/12/2019)	Aula Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sulsel, Makassar	Kabid Pengembangan Kompetensi dan Diklat BKPPD Sidrap, Hj Syahriani
24	Sekolah Adiwiyata Nasional (SDN 5 Tanru Tedong)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	Jumat (13/12/2019)	Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup Sidrap, Hj Aryani
25	Peringkat Tiga Terbaik, Pemerintah Kabupaten/Kota di luar Pulau Jawa Pendukung Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2019	Kemenko Bidang Perekonomian RI.	Kamis, (19/12/2019)	Gedung Ali Wardhana , Jl Lapangan Benteng, Jakarta Pusat	Wakil Bupati Sidrap, H Mahmud Yusuf